ANALISIS DAMPAK PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENERIMA DI NAGARI MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Seminar proposal
Pada Jurusan Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

Abdul Hakim Alamsya
3220110

PRORAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
2024/2025

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulilah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Dampak Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur Ix Kabupaten Lima Puluh Kota"** serta shalawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Proses penyusunan ini penulis berhadapan dengan tantangan dan kesulitan, namun tantangan dan kesulitan tersebut dapat teratasi berkat bimbingan, petunjuk dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Silfia Hanani, S.Ag., M.si selaku rector UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta wakil rector I, II, DAN III..
2. Bapa Dr. Aidil Alfin, M.ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta bapak/ibu wakil.
3. Ibu Rika Widianita, SEI., ME selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapa H. Harfandi, SE, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan meluangkan waktunya selama proses bimbingan.

5. Bapa Yuwarman Mansur, SE, MM selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Terimakasih kepada para masyarakat penerima program kartu prakerja teleh izin untuk melakukan penelitian.

Bukittinggi, 16 Juli 2025
Penulis,

Abdul Hakim Alamsya
NIM.3220110

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh: **ABDUL HAKIM ALAMSYAH, NIM 3220110, Skripsi Yang Berjudul "ANALISIS DAMPAK PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENERIMA DI NAGARI MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,** Skripsi mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak Program Kartu Prakerja terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Program ini merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja masyarakat melalui pelatihan berbasis digital dan insentif pasca-pelatihan. Fokus penelitian ini adalah pada pengalaman subjektif penerima manfaat dalam merasakan perubahan kondisi sosial dan ekonomi setelah mengikuti program.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitaif deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat nagari Muaro Paiti dan penerima Program Kartu Prakerja.data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada penerima manfaat program Kartu Prakerja.

Hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota,menunjukkan dampak Program Kartu Prakerja dalam meningkatkan Kesejahteraan masarakat penerima yaitu; 1)dapat memerikan keringanan untuk biaya pelatihan, 2)mengurangi beban biaya mencari informasi pelatihan, 3)mendorong masyarakat agar bekerja, 4)menjadi pelengkap yang efektif bdagi pendidikan formal, dan 5)meningkatkan daya beli masyarakat.

Kata Kunci*: **Analisis dampak, Program Kartu Prakerja, Kesejahtteraan***

DAFTAR ISI

ANALISIS DAMPAK PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENERIMA DI NAGARI MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KATA PENGANTAR ii

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

BAB 1PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Batasan Masalah 7

D. Rumusan Masalah 7

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

F. Penjelasan Judul 8

BAB 11 LANDASAN TEORI 11

A. Konsep kesejahteraan 11

B. Konsep Dampak 16

C. Program Kartu Prakerja 19

D. Landasan Syariah 26

E. Kajian Terdahulu 29

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. Jenis Penelitian 33

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 34

C. Data Informan 34

D. Jenis dan Sumber Data 35

E. Metode Pengumpulan Data 36

F. Metode Analisis Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40

A. Gambaran Umum 40

B. Dampak Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 50

C. ANALISIS PENULIS 63

D. ANALISIS SYARIAH 69

BAB V70 PENUTUP 70

A. KESIMPULAN 70

B. SARAN 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN I

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerima Program Kartu Prakerja 3
Tabel 2.2 Kajian Terdahulu 29
Tabel 3.1 Data Informan..... 35
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan Di Nagari Muaro Paiti 49
Tabel 4.2 Penduduk Nagari Muari Paiti Menurut Mata Pencaharian 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Keadaan Geografis di Nagari Muaro Paiti 46

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang belum bisa dikatakan sejahtera. Banyak masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial masih belum terselesaikan dari dulu hingga sekarang. Hal tersebut menimbulkan pemikiran bahwa masih diperlukan kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih efektif. Kebijakan tersebut harus bersifat terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa melihat status sosial ekonomi, agama, ras, suku bangsa, usia, dan jenis kelamin. Sehingga semua masyarakat dapat memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Faktor lain yang memicsu rendahnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia yaitu masalah pengangguran. Pengangguran tersebut yang terjadi karena ketidakseimbangan dan ketidak cocokan antara permintaan lapangan kerja dengan penawaran lapangan kerja. Selain kelebihan tenaga kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat juga menjadi alasan terjadinya pengangguran. Pasalnya lapangan pekerjaan yang tersedia hanya dapat diisi oleh beberapa orang saja. Oleh karena itu, memiliki pekerjaan yang layak masih belum dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia.[1]

Kesejahteraan masyarakat suatu daerah merupakan suatu permasalahan yang menjadi perhatian semua orang. Kesejahteraan merupakan tatanan Kehidupan sosial, material, dan spiritual yang disertai rasa aman, kesusilaan,

[1] Soleh, A. (2017). Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, *6*(2), 83-92.

dan kedamaian pribadi. Setiap warga negara dapat berupaya memenuhi kebutuhan materi, spiritual, dan sosial dirinya, keluarga, dan masyarakat semaksimal mungkin dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Suatu masyarakat dikatakan sejahtera apabila seluruh kebutuhannya terpenuhi. Kesejahteraan ini dapat diukur dari yaitu : 1) kesehatan masyarakat 2) status ekonomi 3)kebahagiaan 4) pendidikan dan kualitas hidup 5) kemiskinan.

Dalam merespon keluhan masyarakat, pemerintah memberikan berbagai macam bantuan yang salah satunya yaitu program Kartu Prakerja yang diresmikan melalui Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.[2]

Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan kepada pencari kerja, pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, atau pekerja yang memerlukan kompetensi tambahan. Program kartu prakerja berbentuk pelatihan dan pemberian insentif yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pekerja sesuai dengan bidang yang diinginkan dan mulai diperkenalkan oleh presiden Jokowi pada kampanyenya ditahun 2019 serta terealisasi pada tahun 2020. Program Kartu Prakerja dinilai cocok untuk mengatasai masalah terkait jumlah angkatan kerja yang tidak memiLiki pekerjaan dan pendapatan yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan.[3]

---

[2] Ningrum, H. S. (2022). Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Semarang. *Journal Of Politic And Government Studies*, *11*(4), 160-171.

[3] Sudiro, A., & Putri, O. A. (2023). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.

Program Kartu Prakerja diberlakukan di seluruh provinsi diIndonesia termasuk di provinsi Sumatera Barat Di Nagari Muaro pati muaro paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengundang antusiasme tinggi dari masyarakat. Dapat dilihat jumlah penerima program kartu prakerja dari tahun 2020 – 2023

Tabel 1.1
Jumlah Pernerima Program Kartu Prakerja

Tahun	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kecamatan Kapur IX	Nagari muaro paiti
2020	7.995	1.154	25 Orang
2021	12.101	2.382	50 Orang
2022	15.389	903	15 Orang
2023	2.217	91	8 Orang
2024	3.104	91	10 Orang

Sumber data : Bps Lima Puluh Kota

Berdasar tabel 1.1 diatas dapat dibuktikan dengan jumlah penerima program pada tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 7.995 orang, dan kecamatan Kapur IX Penerimaan kartu proram prakerja Sebanyak 1.154, tetapi masyarakat di Nagari muaro paiti sebanyak 25 orang. Penerimaan program kartu prakerja pada tahun 2021 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 12.101 dan kecamatan Kapur IX Penerimaan kartu proram prakerja Sebanyak 1.154 orang, tetapi masyarakat di Nagari muaro paiti sebanyak 50 orang, penerimaan program kartu prakerja di kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan penerimaan, dan juga penerimaan program kartu

prakerja di kecamatan Kapur IX dan Nagari Muaro Paiti juga menalami peningkatan pada tahun 2021 ini.

Penerimaan program kartu prakerja pada tahun 2022 sebanyak 15.389 orang dan kecamatan Kapur IX Penerimaan kartu proram prakerja Sebanyak 903 orang, tetapi masyarakat di nagari muaro paiti sebanyak 15 orang , penerimaan program kartu prakerja di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan penerimaannya dari tahun sebelumnya, tetapi penerimaan program kartu prakerja di Kecamatan Kapur IX dan Nagari muaro paiti mengalami penurunan penerimaan program prakerja pada tahun ini. Penerimaan program kartu prakerja pada tahun 2023 sebanyak 2.217 orang dan kecamatan Kapur IX Penerimaan kartu proram prakerja Sebanyak 91 orang, tetapi masyarakat di nagari muaro paiti sebanyak 8 orang, penerimaan program kartu prakerja di Kabupaten Lima Puluh Kota menurun yang sangat dratis dari tahun sebelumnya, dan Kecamatan Kapur IX dan Nagari Muaro Paiti sama halnya juga mengalami Penurunan.

Penerimaan program kartu prakerja pada tahun 2024 sebanyak 3.104 orang dan kecamatan Kapur IX Penerimaan kartu proram prakerja Sebanyak 91 orang, tetapi masyarakat di nagari muaro paiti sebanyak 10 orang , penerimaan program prakerja di Kabupaten Lima Puluh Kota Mengalami Peningkatan Dari tahun Sebelumnya, di Kecamatan Kapur IX penerimaannya masih sama denan tahun sebelumnya, tetapi di Nagari muaro paiti mengalami peningkatan dalam penerimaan program kartu prakerja. Mengkaji data diatas tersebut, telah diketahui bahwa jumlah penerimaan program prakerja di Kabupaten lima

Puluh Kota yang tertinggi penerimaanya pada tahun 2022 sebanyak 15.389 orang sedangkan yang paling sedikit penerimaan proram prakerja pada tahun 2023 sebanyak 2.217 orang. Penerimaan program prakerja di Kecamatan kapur IX yang paling tertingi pada tahun 2021 sebanyak 2.382 orang,Sedangkan yang paling sedikit penerimaannya pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak 91 orang, sedangkan di Nagari Muaro Paiti yang tertinggi penerimaannya pada tahun 2022 sebanyak 50 orang sedangkan yang paling sedikit penerimaan di nagari paiti pada tahun 2023 sebanyak 8 orang.

Rendahnya penerima program kartu prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu karena keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses program ini karena dilakukan secara online mengingat tidak semua masyarakat paham dalam menggunakan internet, serta tidak semua masyarakat memiliki handpone untuk bisa mendaftarkan diri sebagai penerima program kartu prakerja. Faktor lain yang menjadi penghambat terealisasinya program ini secara merata di seluruh lapisan masyarakat adalah adanya beberapa Nagari yang hingga saat ini belum memiliki akses internet. Ketiga faktor tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga yang menerima program hanya sebanyak 29 orang.

Program kartu prakerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada realitanya hal tersebut tidak terjadi. Fakta dilapangan khususnya di Nagari Muaro paiti berdasarkan wawancara dengan Bapak Rajab selaku pegawai kantor Kecamatan Kapur IX mengatakan maka dapat

diperoleh informasi bahwa insentif yang diberikan pasca pelatihan sebagian besar digunakan oleh masyarakat penerima program sebagai kebutuhan konsumtif, hal ini terjadi karena tidak semua masyarakat bisa memenuhi kebutuhan primer, sementara pelatihan yang diberikan tidak dijalankan dengan serius oleh penerima program. Selain itu banyak juga yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendaftarkan diri sebagai penerima program yang akan dibayar sesuai dengan kesepakatan. Sementara pelatihan yang ada pada program ini dilakukan oleh pihak ketiga tersebut, itu artinya penerima program hanya memanfaatkan insentifnya saja tanpa menjalani pelatihan. [4]

Oleh karena itu penelitian ini akan membahas dampak program kartu prakerja terhadap kesejahteraan masyarakat penerima terhadap program tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah terkait **"Analisis Dampak Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks skripsi " Analisis Dampak Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota" beberapa identifikasi masalah dapat diuraikan:

1. Kendala teknologi dan jaringan yang sering di temukan oleh masyarakat penerima Nagari Muaro Paiti yang masih gaptek.

[4] Wawancara degan Bapak Rajab selaku peawai kantor kecamatan Kapur IX Tgl 12 0ktober 2024, Jam 13.00 Wib

2. Banyaknya masyarakat penerima yang mengunakan pihak ketiga untuk mendaftarkan diri dalam penerimaan program prakerja yang hanya mengharapkan insentifnya saja.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih terarah maka di perlukan batasan masalah pada “analisis dampak program kartu prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima di nagari muaro paiti kecamatan kapur ix kabupaten lima puluh kota.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di terangkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahn yaitu bagaimana Dampak Program Kartu Prakerja Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian dari skripsi adalah untuk Memganalisis Dampak Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota " Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Bagi penulis

   Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi), Universitas Islam Negeri Syejch M. Djamil Djambek Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat

2. Bagi masyarakat Nagari Muaro Paiti

Bagi masyarakat dapat memberikan informasi dan pengetahuan maupun masukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat

3. Bagi peneliti selanjutnya

   Untuk peneliti selanjutnya yan berminat untuk meneliti mengenai proram kartu prakerja terutama pada masyarakat penerimaannya yang bisa menjadikan penelitian ini sebagai referensi.

4. Bagi Pemerintah Daerah Kapur IX

   Sebagai suatu acuan untuk menetapkan kebijakan yan mendukung sehingga dapat diandalkan untuk peningkatan kejahteraan masyarakat lokal terutama bagi masyarakat yang selama ini masih hidup dalam garis kemiskinan.

F. Penjelasan Judul

Untuk lebih mudah memahami dan mengindari keraguaan terhadap penelitian diatas, berikut penulis akan menjelaskan pengertian yang terdapat dalam judul penulisan proposal ini:

A. Dampak	Adalah pengaruh atau akibat yang terjadi akibat adanya sesuatu. Dampak bisa berupa perubahan yang terjadi pada manusia setelah melakukan aktivitas, dan bisa berakibat positif maupun negatif.[5]

[5] Massie, A. Y., & Nababan, K. R. (2021). Dampak pembelajaran daring terhadap pendidikan karakter siswa. *Satya Widya*, *37*(1), 54-61.

B. Program Kartu Prakerja :	Adalah suatu rancangan struktur, desain, kode skema, maupun bentuk yang lainnya dengan yang disusun sesuai alur Algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan.[6] Program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.[7]
C. Kesejahteraan	Kesejahteraan penerima terhadap program kartu prakerja yaitu untuk kehidupan setiap warga negara untuk pengembangan kopetensi kerja dan kewirausahan yang ditujukan untuk mencari pekerja, pekerja/Buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja

[6] Muryadi, A. D. (2017). Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran)*, *3*(1).

[7] Christian, S., Ginting, B., & Ritonga, F. U. (2022). Tanggapan Masyarakat Penerima Manfaat Terhadap Penggunaan Manfaat Program Kartu Prakerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasar Doloksanggul: Bahasa Indonesia. *AQUACOASTMARINE: Journal of Aquatic and Fisheries Sciences*, *1*(1), 27-32.

dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kopetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.[8]

Dari penjelasan judul diatas dapat simpulkan bahwa program kartu prakerja bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan penerima dari segi kompetensi kerja, produktivitas, dan daya saing. Program prakerja juga memiliki pengaruhnya yang signifikan terhadap keterampilan kewirausahaan, yang juga dapat menciptakan multtilier effect pada penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu juga terdapat juga bukti bahwa program kartu prakerja memiliki dampak signifikan terhadap upah.

[8]Ilyas, R. (2016). Etika konsumsi dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *1*(1), 152-172.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep kesejahteraan

1. Indikator kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. kesejahteraan maupun sejahtera dapat memiliki empat arti. Dimana sejahtera dalam istilah umum, menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi dimana manusia ataupun orang-orangnya dalam keadaan makmur, dan dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial, sejahtera juga memiliki arti khusus atau teknikal. Dalam mempresentasikan tingkat kesejahteraan karena keterbatasan indikator ekonomi, masyarakat telah meningkatkan perhatian dunia terhadap aspek sosial dalam pembangunan.

Dilihat dari indikator ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Tingkat kesejahteraan juga dapat diukur dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan indikator objektif yang diukur melalui pendapatan, sedangkan berikutnya menggunakan indikator subjektif yang diukur melalui kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, ketersediaan waktu luang, kondisi lingkungan,

keharmonisan keluarga, kondisi rumah dan keamanan. Indikator tersebut memperluas skala pengukuran tingkat kesejahteraan.[9]

Kesejahteraan memiliki konsep yang dirumuskan sebagai padanan konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu : rasa aman (security), kesejahteraan (welfare), kebebasan (freedom), dan jati diri (identity). Tentang kesejahteraan sosial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyebutkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Keberhasilan pembangunan manusia khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang semakin mendasar di masyarakat tersebut dapat diatasi. Permasalahan tersebut diantaranya kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal dan selanjutnya muncul pertanyaan bagiamana menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan.[10]

Tujuan dalam suatu negara yaitu menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat yang dilakukan dengan upaya pembangunan ekonomi. Pemerintah melakukan kegiatan ekonomi memiliki

---

[9] Purba, M. S., & Andiny, P. (2023). Analisis Indikator Kesejahteraan Masyarakat: Studi Komparatif Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Asahan. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, *1*(2).

[10] INDRA, Y. A. (2021). *Pengelompokan Provinsi Di Indonesia Berdasarka Indikator Kesejahteraan Masyarakat* Menggunakan *Metode Algoritma Self Organizing Maps (SOM)* (Doctoral dissertation, UniversitasMuhammadiyahSemarang).

tujuan untuk meningatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembangunan pada daerah yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya tergolong rendah, yang menjadi target utama adalah efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Rencana jangka menengah yang menjadi prioritas dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan yang memiliki lima sasaran pokok, yaitu: penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar wilayah, meningkatkan kualitas masyarakat, perbaikan mutu lingkungan hidup, peningkatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam. Pada implementasinya prioritas utama dari pembangunan ekonomi adalah pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, penataan kelembagaan, dan pelaksanaan system perlindungan sosial.[11]

Kesejahteraan masyarakat selalu berkaitan erat dengan paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dapat dinyatakan memperoleh keberhasilan bila tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan maka dapat mengakibatkan ketimpangan dan kesenjangan. Ukuran kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan. Kesejahteraan merupakan sebuah cerminan dari kualitas hidup masyarakat, yaitu terpenuhnya kebutuhan primer dan terealisasinya nilai-nilai hidup. Pengertian kesejahteraan masyarakat merupakan sistem suatu negara untuk membantu masyarakatnya dalam memperoleh kebutuhan

[11] Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *5*(2), 8-21.

sosial, pendidikan, kesehatan yang penting terhadap keberlangsungan hidup masyarakat negara tersebut. Terdapat pengertian yang berbeda terhadap kesejahteraan karena bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman dan tujuan hidup yang berbeda akan memberikan pandangan dan nilai yang berbeda pula pada kesejahteraan dan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.[12]

Kondisi yang sejahtera merupakan keadaan jasmani dan rohani rumah tangga telah terpenuhi sesuai dengan tingkat kehidupannya. Menurut BPS (2020) untuk melihat tingkat kesejahteraan terdapat beberapa indikator, antara lain :

a. Pendapatan, pendapatan atau penghasilan merupakan sutu indikator yang dapat menilai kesejahteraan masyarakat. pendapatan yang dimaksud merupakan total kas yang didapatkan oleh individu maupun rumah tangga dalam rentang waktu tertentu. Pendapatan terbagi atas penghasilan tenaga kerja, tunjangan pemerintah, dan penghasilan atas hak milik (deviden atau sewa).
b. Perumahan dan pemukiman, rumah sebagai tempat untuk tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia, rumah juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dasar keluarga dalam meningkatkan sumber daya manusia. Selain itu rumah juga merupakan bagian dari kesehatan masyarakat, rumah yang sehat dan nyaman akan menunjang kesehatan tiap penghuninya.

[12] Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.

c. Pendidikan, merupakan hak dari setiap warga negara untuk pengembangan potensi diri melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat yang dimiliki dan tidak membedakan status ekonomi, sosial, etnis, budaya, agama, suku, maupun letak geografis dalam dunia pendidikan.
d. Kesehatan, kesehatan termasuk salah satu faktor dari pengukuran. Pengukuran untuk mengetahui tingkatan kesejahteraan ada delapan indikator, antara lain yaitu pendapatan, pengeluaran keluarga, konsumsi, keadaan tempat tinggal, kesehatan setiap anggota keluarga, kemudahan mendapatkan layanan kesehatan, fasilitas tempat tinggal, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendikan, kemudahan memperoleh fasilitas transportasi terdapat diskriminasi pada proses pelaksanaannya. Kesehatan sebagai bagian dari indikator kesehatan bisa ditentukan dari kemampuan masyarakat dalam menjalani pengobatan pada layanan kesehatan serta dapat membiayai secara penuh layanan kesehatan tersebut.

Pengukuran untuk mengetahui tingkata kesejahteraan ada delapan indikator, antara lain yaitu pendapatan, pengeluaran keluarga, konsumsi, keadaan tempat tinggal, kesehatan setiap anggota keluarga, kemudahan mendapatkan layanan kesehatan, fasilitas tempat tinggal, kemudahan

memasukkan anak kejenjang pendikan, kemudahan memperoleh fasilitas transportasi.[13]

B. Konsep Dampak

Dampak secara sederhana dapat di artikan sebagai suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik sosial, ekonomi, fisik, kimia maupun biologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik dampak positif maupun negative.[14]

Pengaruh adalah adanya daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Adapun dampak memberikan pengaruh berupa:

1. Dampak positif yaitu dampak yang berpengaruh positif.
2. Dampak negatif yaitu dampak yang berpengaruh negatif.
3. Dampak langsung yaitu dampak yang dirasakan langsung dan berkaitan dengan dampak positif.
4. Dampak tidak langsung yaitu dampak tidak langsung yang dirasakan dengan adanya suatu pengaruh.[15]

---

[13] Febrianti, F. (2021). *Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat kota medan berdasarkan standart kesejahteraan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

[14] Malimbe, A., Waani, F., & Suwu, E. A. (2021). Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal ilmiah society*, *1*(1).

[15] Marpaung, J. (2018). Pengaruh penggunaan gadget dalam kehidupan. *KOPASTA: Journal of the Counseling Guidance Study Program*, *5*(2).

Keberadaan perusahaan berdampak positif terhadap masyarakat sekitarnya bisa bersifat langsung dan tidak langsung. Bersifat langsung, maksudnya kesejahteraan pekerja/karyawan di perusahaan itu sendiri, yang ditentukan oleh faktor-faktor berikut: sistem imbalan dan penghargaan; tingkat gaji; sistem seleksi dan pengembangan karyawan (termasuk sistem mutasi dan promosi/peningkatan karier); sistem tunjangan/jaminan sosial/pensiun; program pelatihan/pendidikan lanjut; hak pekerja berserikat; pelayanan kesehatan karyawan dan pelayanan internal lainnya yang menguntungkan karyawan; rancangan, lingkungan dan keamanan kerja; fasilitas sosial karyawan (seperti tempat ibadah dan istirahat); dan kegiatan sosial/rekreasi karyawan dan keluarganya. Faktor-faktor ini adalah bagian dari pengelolaan internal perusahaan. Jika semua faktor tersebut dilakukan dengan baik, hasilnya kepuasan karyawan yang selanjutnya berdampak positif terhadap produktivitas dan retensi karyawan, yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan oleh perusahaan (karyawan) bersangkutan.[16]

Sedangkan bersifat tidak langsung, maksudnya adalah dampak positif dari keberadaan sebuah perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya yang bukan pekerja di perusahaan tersebut. Menurut sifatnya, ini bisa dibagi dua lagi, yakni langsung dan tidak langsung. Langsung adalah kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat sekitarnya, biasa disebut Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

[16] Fitria, H. A. (2019). *analisis dampak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) terhadap kesejahteraan masyarakat (studi pada sentra industri kecil roti desa kalimalang kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

sekitarnya, yang pada akhirnya menjamin adanya akselerasi pembangunan ekonomi dan masyarakat lokal yang berkesinambungan. CSR bisa dalam berbagai macam bentuk, mulai dari yang nilainya besar seperti membangun sekolah, rumah sakit, jalan umum, penerangan jalan, tempat ibadah, taman, tempat rekreasi, beasiswa, dan lain-lain, hingga yang lebih rendah nilainya namun sangat berarti bagi masyarakat sekitarnya seperti sumbangan pada perayaan 17 agustus, pelayanan kesehatan gratis, dan lainlain[17]

Tidak langsung adalah dampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan/kegiatan-kegiatan ekonomi lokal lainnya melalui keterkaitan produksi/bisnis antara perusahaan bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lokal lainnya tersebut. Misalnya, perusahaan bersangkutan menggunakan bahan baku atau input yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan setempat (jadi bukan bahan baku impor), atau perusahaan itu menginvestasikan sebagian dari keuntungannya dalam kegiatan-kegiatan ekonomi lokal lainnya. Sifat tidak langsung ini juga bisa dalam bentuk efek keterkaitan konsumsi: pekerja-pekerja di perusahaan tersebut membelanjakan pendapatan mereka di dalam ekonomi lokal (tidak membeli barang kebutuhan dari luar wilayah, termasuk barang-barang impor).[18]

---

[17] Afriandy, A. (2010). Pengaruh Biaya Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tingkat Laba Perusahaan.

[18] Dayanti, P. R., & Prasetiyo, L. (2023). Peran UMKM CV Tas Rakyat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam Desa Ngampel. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, *3*(2), 335-345.

C. Program Kartu Prakerja

1. Pengertian program kartu prakerja

Program dapat diartikan sebagai kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari usaha yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Suatu program yang baik harus memiliki keterkaitan antara tujuan program dengan sasaran, masuk akal dan bisa dicapai Program.[19]

Kartu Prakerja merupakan salah satu program pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja bagi pemilik Kartu Prakerja. Dalam Peraturan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2020) No 36 Tahun 2020 pasal 1 ayat yang berbunyi: ”Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan”.[20]

Program kartu prakerja diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat meningkat pendapatan karena semakin tinggi pendapatan seseorang makin tinggi pula daya belinya dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi, dan sebaliknya. Program kartu prakerja sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional masyarakat pada usia produktif, agar masyarakat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dibidangnya. Oleh sebab itu pemerintah menggunakan beberapa platform pembelajaran online agar menyediakan kelas kelas online yang dapat digunakan masyarakat. Manfaat dari pelatihan skill yang

[19] Dhuka, M. N. (2022). Perencanaan Strategis Mutu Pendidikan Agama Islam. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, *3*(4), 287-298.

[20] Wulandari, H., Antasari, R. R., & Afriansyah, S. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. *Muamalah*, *7*(1), 204-226.

diberikan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan serta skill dalam bidang yang diinginkan oleh para penerima prakeja. Jadi penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kartu prakerja merupakan suatu identitas yang diberikan kepada seorang yang telah resmi terdaftar sebagai calon perserta Program Kartu Prakerja yang di buat oleh pemerintah.[21]

Guna untuk masyarakat yang ingin meningkatkan keahliannya dengan mengikuti pelatihan yang telah disediakan oleh kementrian ketenagakerjaan. Adapun sasaran program kartu prakerja adalah sebagai berikut:

a. Pencari kerja berusia minimal 18 tahun
b. Pekerja/buruh yang terkena PHK
c. Pekerja bukan penerima upah seperti pelaku usaha mikro dan kecil
d. Tidak sedang berada dalam pendidikan formal.[22]

2. Tujuan program kartu prakerja

Tujuan utama dari terciptanya program kartu prakerja adalah sebagai wadah pengembangan kompetensi, peningkatan produktifitas, serta pengembangan kegiatan kewirausahaan dengan mengikuti bermacam pelatihan agar dapat meningkatkan peluang karir dan mandiri sehingga diprioritaskan di dunia kerja. Masyarakat yang telah terlatih pada umumnya lebih memiliki kemampuan dalam menunjukkan produktifitas yang lebih besar, berarti mampu melakukan perubahan sikap, perilaku, pengetahuan

---

[21] Rhadityo, S. (2022). Analisis daya beli masyarakat melalui program kartu prakerja di era pandemi COVID-19. *Jurnal Investasi Islam*, *7*(1), 14-19.

[22] Hakim, A. B. D. U. R. R. O. H. M. A. N. (2022). *Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja Untuk Menangulangi Pengangguran di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur)* (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD").

serta keahlian yang lebih spesifik. Program pelatihan ini diharapkan dapat membantu dalam mempersingkat waktu dalam belajar sehingga dapat mencapai kinerja yang diharapkan. sertifikasi pelatihan yang diperoleh dari lembaga terpercaya dapat meningkatkan nilai masyarakat.[23]

Program Kartu Prakerja ini memiliki banyak fitur digital yang membantu peserta penerima bantuan tersebut meningkatkan kompetensi dan daya saing dalam bekerja. Bukan hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif dana berupa uang bagi peserta yang telah melalui berbagai pelatihan dan pembinaan secara daring (virtual). Insentif dana yang diberikan tersebut diharapkan dapat dipergunakan bagi peserta untuk dibelanjakan agar roda perekonomian bisa berjalan dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat walaupun di tengah pandemi. Jaminan kesejahteraan sosial dalam Program Kartu Prakerja telah membantu masyarakat terkhusus untuk para pekerja yang tidak bekerja. Walaupun dampak yang ditimbulkan belum begitu progresif untuk masyarakat, namun pemerintah berupaya agar kebijakan dalam Program Kartu Prakerja bisa membantu dan mengurangi beban pada masyarakat.[24]

---

[23] Rachmah, D. S. (2020). *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Pra Kerja Di Kecamatan Medan Denai (Evaluasi Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 Tentang pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

[24] Memah, N. I., Rares, J. J., & Waleleng, G. J. (2022). Efektivitas Program Kartu Prakerja Era Pandemi Covid-19 Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*, *18*(1), 247-254.

3. Syarat dan Ketentuan untuk mendapatkan kartu prakerja

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 2020 pasal 3 ayat (4) yang berbunyi: Pencari kerja dan pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

a. Warga negara Indonesia (WNI)
b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
c. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal

Pengguna harus berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah dan tidak berada dibawah perwakilan atau pengampuan agar pengguna memiliki kapasitas cara hukum dan Program ini juga tidak dapat diikuti oleh pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, kepala dan perangkat desa, serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.[25]

4. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja

Untuk dapat menjadi penerima manfaat program, calon peserta harus mendaftarkan diri pada program Kartu Prakerja yang dilakukan secara daring melalui situs resmi program. Dalam situasi tertentu, pendaftaran program juga dapat dilakukan secara luring melalui kementerian/lembaga atau pemerintah daerah (Pasal I Perpres 76 tahun 2020). Setelah itu, akan dilakukan proses seleksi dengan menggunakan data kependudukan (dengan sinkronisasi data kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BPJS

[25] Wulandari, H., Antasari, R. R., & Afriansyah, S. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. *Muamalah*, *7*(1), 204-226.

Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, dan/atau PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), serta memberikan prioritas kepada pendaftar tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja.[26]

Pelatihan yang diselenggarakan dalam ekosistem program Kartu Prakerja disediakan oleh Lembaga Pelatihan (LP) dapat diakses oleh calon peserta pada Platform Digital (PD), yakni badan usaha atau lembaga yang bertugas dalam menyediakan akses pilihan Pelatihan kepada peserta, yang ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Pelatihan yang disediakan dalam ekosistem program Kartu Prakerja harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat tayang dan diikuti oleh peserta. Kriteria dan ketentuan detail mengenai hal tersebut diatur oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dalam Dokumen Standar Kualitas Pelatihan (Masa Transisi), antara lain:

a. Durasi penyampaian materi minimal 6 jam
b. Pelatihan ditujukan untuk mengembangkan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh industri dengan mengacu kepada Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia dan Indotask
c. Pelatihan bersifat interaktif yang dapat mengetahui respon peserta terhadap konten belajar yang dikonsumsi

[26] Septiyadi, M. R., & Rahayu, E. (2022). Program Kartu Prakerja Sebagai Program Pemberdayaan Di Bidang Ketenagakerjaan Di Tengah Pandemi. *Jurnal Pembangunan Manusia*, *3*(2), 5.

d. Konten belajar diatur sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan peserta mengonsumsi materi yang disediakan (antara lain dengan menonaktifkan fitur percepat pemutar video)
e. Menyediakan sesi konsultasi yang dapat diikuti oleh peserta dalam memperdalam pengetahuan yang didapatkan melalui materi belajar yang disediakan
f. Menggunakan setidaknya 3 metode ajar, dengan minimal mencakup kuliah/ceramah dan demonstrasi/peragaan
g. Diajarkan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dengan bidang[27]

5. Manfaat Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja ini memiliki banyak fitur digital yang membantu peserta penerima bantuan tersebut meningkatkan kompetensi dan daya saing dalam bekerja. Bukan hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif dana berupa uang bagi peserta yang telah melalui berbagai pelatihan dan pembinaan secara daring (virtual). Insentif dana yang diberikan tersebut diharapkan dapat dipergunakan bagi peserta untuk dibelanjakan agar roda perekonomian bisa berjalan dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat walaupun di tengah pandemi. Jaminan kesejahteraan sosial dalam Program Kartu Prakerja telah membantu masyarakat terkhusus untuk para pekerja yang tidak bekerja. Walaupun dampak yang ditimbulkan belum begitu progresif untuk masyarakat, namun pemerintah berupaya

[27] Ginting, M. L. B., & Herdiyana, R. (2020). Peran pemerintah pada kebijakan kartu prakerja dalam memulihkan kesejahteraan pekerja di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Analis Kebijakan*, *4*(2), 1-15.

agarkebijakan dalam Program Kartu Prakerja bisa membantu dan mengurangi beban pada masyarakat .[28]

Hadirnya kartu prakerja sebagai solusi atas semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia dan mengatasi masalah terkait ketenagakerjaan, adapun solusi yang diberikan adalah sebagai berikut:

a. Memberikan keringanan atas biaya pelatihan oleh pekerja dan perusahaan
b. Membantu pengurangan biaya dalam mencari informasi pelatihan
c. Mendorong untuk bekerja
d. Menjadi tambahan dari pendidikan formal
e. Membantu peningkatan daya beli masyarakat terdampak pandemic Covid-19.

Program kartu prakerja ini dapat dinikmati oleh seluruh Warga Negara Indonesia dan ramah bagi kaum difabel, sehingga pemerintah menganjurkan para kaum difabel untuk mengikuti program kartu prakerja. Dengan adanya program kartu prakerja, pemerintah berharap bahwa program ini dapat membantu para pencari kerja dan masyarakat terdampak PHK dalam membantu menambah keterampilan dan pengetahuan yang baru. Dengan berbekal pelatihan dari kartu prakerja, sertifikat pelatihan, dana insentif diharapakan dapat mempermudah peserta untuk mendapatkan pekerjaan dan

[28] Putra, R. M. (2021). Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Maslahat. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH*, *2*(3), 551-566.

membangun usaha sehingga dapat menekan laju tingkat pengangguran di Indonesia.[29]

D. Landasan Syariah

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa kajian maqashid syariah merupakan syarat yang dipakai dalam melakukan ijtihad untuk menyikapi berbagai persoalan ekonomi dan finansial (Nurhadi, 2019). Maqashid syariah digunakan sebagai alat analisis oleh para ulama dalam menjawab segala permasalahan yang ada di dunia dan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah kebijakan program kartu prakerja.

Efektifitas realisasi program kartu prakerja hampir mencapai target dari apa yang sudah direncanakan. Hal ini berdasarkan pada realisasi program kartu prakerja sampai dengan 23 september tersalurkan Rp 16,67 Triliun untuk 4,86 juta penerima, dan sebagaimana laporan tahunan 2020 tentang realisasi program kartu prakerja, anggaran yang terserap mencapai 19,8 Triliun. Ada berbagai macam kriteria peserta pelatihan prakerja yang menemukan bahwa, pertama; ada peserta program kartu prakerja yang tidak tepat dalam mengikuti pelatihan, akan tetapi sangat membutuhkan bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, kelompok ini termasuk golongan masyarakat miskin yang tidak memenuhi kriteria bansos reguler, seperti PHK.

[29] Memah, N. I., Rares, J. J., & Waleleng, G. J. (2022). Efektivitas Program Kartu Prakerja Era Pandemi Covid-19 Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*, *18*(1), 247-254.

Penelitian ini juga menemukan bahwa program kartu prakerja sudah sesuai dengan sasaran pelatihan dan sasaran bansos yang pesertanya terdampak Covid19. Kedua; Kebanyakan peserta pelatihan tidak memilih secara saksama karena belum mengetahui renacana kariernnya. Ketiga; pentingnya seleksi calon peserta program kartu prakerja, mengingat adanya hubungan yang kuat antara isu ketepatan sasaran, manfaat pelatihan, dan proses pemilihan pelatihan.

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan diatas, program kartu prakerja sudah selaras dengan tujuan maqashid syariah, yaitu segala aktifitas atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan asas kemaslahatan bersama. Kemaslahatan ini terlepas dari siapa saja yang menerimanya, baik itu orang yang membutuhkan pelatihan atau tidak, keduanya sama-sama menjadi korban dari dampak pandemi Covid-19.[30] Hal ini berkaitan dengan keadilan adalah pondasi utama dalam mengeakan kesejahteraan sosial dan menjaga persatuan umat yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat(8):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

[30] Hamzah, I. R., & Khusnia, S. (2021). Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Sosial Teknologi*, *1*(1), 19-25.

Dari kaidah ini adalah seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu berorientasi pada perbaikan-perbaikan dari seluruh elemen masyarakat, seperti masalah pengangguran dan kemiskinan. Mengingat tindakan dan kebijakan tersebut harus diambil atas dasar kepentingan bersama bukan untuk kepentingan seseorang atau golongan tertentu. Kemudian jika dilihat dari analisis tinjauan maqashid syariah perspektif imam asSyatibi sebagai berikut (Wardi, 2018): Asas dharuriyah : Asas ini masuk pada wilayah kebutuhan wajib yang memang harus dipenuhi, jika tidak, maka akan menimbulkan kerusakan (mudharat).

Bantuan realisasi program kartu prakerja (semi bansos) pada masa pandemi Covid19 banyak diarahkan pada struktur masyarakat miskin dan terkena PHK. Kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya dari pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar (primer). Sehingga, dengan adanya pemenuhan kebutuhan dasar yang diupayakan oleh pemerintah akan berdampak terhadap perlindungan dalam menjaga lima unsur yang ada di maqashid syariah yaitu manjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Asas Hajiyah : Asas Hajiyah diperlukan agar dapat menghilangkan berbagai kesulitan dalam pemeliharaan terhadap lima unsur tersebut (pemenuhan kebutuhan sekunder). Dalam hal ini, program kartu prakerja hadir dalam rangka memfasilitasi sumber daya manusia (SDM) untuk ikut berkompetisi dalam dunia kerja (bisnis) melalui berbagai pelatihan yang telah disediakan oleh pemerintah dengan tujuan agar menjadi SDM yang unggul, kompetitif, dan mempunyai daya saing.

Bentuk pengejawantahan asas tahsiniyah dalam Program kartu prakerja adalah pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintah. Pelatihan tersebut bertujuan supaya sumber daya manusia mempunyai kompetensi dan mampu berkompetisi dalam dunia kerja. Asas ini memberikan pemahaman bahwa manusia sebagai khalifah di Bumi dapat melakukan kegiatan yang terbaik dalam rangka penyempurnaan pemeliharaan dari lima unsur maqashid syariah. Sehingga, program kartu prakerja melalui pelatihanpelatihan yang sudah disiapkan oleh pemerintah diharapkan bisa memotong angka pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

E. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubunganya denan penelitian yan akan dilakukan oleh penulis. Adapaun beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kolerasi denan penelitian ini adalah :

Tabel 2.2
Kajian Terdahulu

NO	Penerangan (Tahun)	Judul	Hasil Temuan
1	Levi Utami Putri (2022)	Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Tengah Covid-19 Bagi Masyarakat Di Kelurahan Kendondong Raye Kecamatan Banyuasin Iii	Menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja memberikan efektif terhadap kesejahteraan sosial di tengah COVID-19 dengan kriteria efektif dari segi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pemantauan program dan tujuan program. Namun pemerintah diharapkan dapat membuka

			gelombang program Kartu Prakerja berikutnya agar masyarakat dapat menerima manfaat dari adanya program Kartu Prakerja.
2	Anik Nur Ria (2023)	Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dengan Perspektif Ekonomi Islam	1) Implementasi program kartu prakerja di Kecamatan Sampung sangat tinggi antusiasnya, baik pemerintah daerah maupun warganya. 2) Strategi yang dilakukan yaitu dengan menghadirkan tim IT ditiap desa serta menyebarluaskan informasi ini di media social. 3) Kesejahteraan masyarakat sendiri belum sepenuhnya terpenuhi, akan tetapi dari insentif yang didapatkan untuk tambahan modal usaha untuk kebutuhan sehari-hari.
3	Arzeta Keanu Indrawan; Muhammad Reihan Algifary; Titan Athma Kayasa (2020)	Analisis Efektivitas Program Kartu Prakerja Terhadap Laju Perekonomian Indonesia	Upaya pemerintah untuk menekan kemiskinan dan pengangguran adalah dengan diterbitkan bantuan sosial berupa Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, maupun yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan /atau yang membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kompetensi. Program ini belum sepenuhnya efektiv,

			karena terdapat faktor penghambat pada proses implementasinya.
4	Diyah Anggraeni,Ruslan Abdul Ghofur , Syamsul Hilal (2023)	Efektivitas Program Kartu Prakerja dalam Membangun Sumber Daya Manusia Pasca Pandemi Covid-19	program pra kerja kurang efektif dalam membangun sumber daya manusia. Program Prakerja memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia..
5	Fransiskus Sunato Kwure, Adi Susiantoro, M. Kendry Widiyanto (2024)	Efektivitas Bantuan Kartu Prakerja Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Masa Covid-19 Di Kota Surabaya	peran dinas ketenagakerjaan Kota Surabaya dalam melaksanakan program Kartu Prakerja belum sepenuhnya efektiv mungkin melalui berbagai tindakan dari penyediaan sarana dan prasarana hingga bimbingan khusus perorangan bagi masyarakat yang belum memahami prosedur pendaftaran. Bahkan masyarakat ini dibimbing sampai melaju pada tahap peelatihan.
6	Fironita, Della and Edyar, Busman and Putra, David Aprizon (2023)	Efektivitas penerapan tujuan program kartu prakerja berdasarkan pasal 2 peraturan presiden Nomor 113 Tahun 2022 ditinjau dari fiqh siyasah(studi kasus desa punguk pedaro Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong)	Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau berbasis lapangan, penelitian ini bersifat kualitatif dimana penelitian ini mendeskripsikan terkait permasalahan penyebab tidak tepatnya tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Desa Pungguk Pedaro,

			yang bersumber dari bahan-bahan hukum data skunder dengan informasi primer yang diperoleh dilapangan. Hasil penelitian ini adalah Belum efektinya penerapan tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022,disebabkan banyak kendala dalam pelaksanaanya, terlihat dari ketepatan sasaram program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program yang masih belum optimal

Persamaan dengan penelitian terdahulu dan penelitian yang saya lakukan adalah sama sama meneliti tentang program kartu prakerja , dan sama sama mengunakan Metode penelitian Deskriptif kualitatif.

Perbedaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang saya lakukan lebih membahas kearah efektivitas program dan prekonomian masyarakat sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih membahas tentang dampak program kartu prakerja terharap kesejahteraan masyarakat yang menerima bantuan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menggali dan memahami makna dari sekelompok individu atau orang yang diduga memiliki permasalahan sosial maupun permasalahan kemanusiaan.

Pada metode penelitian kualitatif, dapat kita sertakan suatu proses dalam mengumpulkan data dalam bentuk observasi, interpretasi maupun melaporkan hasil yang diperoleh secara bersamaan, disamping itu juga dilibatkan pengumpulan data yang dilakukan secara terbuka atas dasar pertanyaaan umum dan analisa informasi yang diperoleh dari responden. Berdasarkan analisis penelitian kualitatif kemudian dibuat pelaporan dalam bentuk jurnal maupun buku ilmiah yang sering dijadikan sebagai model analisis yang digunakan secara umum.

Peneliti menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif meliputi data data yang dikumpulkan baik berupa kata-kata, gambar dan bukan dalam bentuk angka. Selain itu, seluruh informasi yang terkumpul bukan tidak mungkin dijadikan kunci atas apa yang telah diketahui. Oleh karena itu, pelaporan dalam metode kualitatif ini akan berisikan kutipan data yang akan memberikan gambaran atas konteksnya yang terjadi secara langsung, dalam upaya menggambarkan suatu kejadian yang sama seperti aslinya, hal ini artinya kejadian tersebut akan melekat dan perspektif dari peneliti akan dilibatkan secara

partisipatif dalam seluruh kejadian yang terjadi.[31]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini akan dilakukan selama periode (spesifikan periode penelitian), dimana peneliti fokus pada permasalahan terhadap program kartu prakerja terhadap kesejahteraan penerima. Penelitian ini mulai dari tgl 22 Oktober 2024 hingga selesai.

C. Data Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan atau partisipan yang tepat sangat penting untuk menghasilkan data yang berkualitas. Informan adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pemahaman yang relevan dengan topik penelitian. Dengan memilih informan yang tepat, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif.

[31] Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Tabel 3.1
Data Informan

No	Nama	Umur	Alamat
1	Asri	18	Jln. Nusantara
2	Erwan	42	Jln. Bundo Kanduang
3	Alfiano	35	Jln. Nusantara
4	Sutrisno	33	Jln. Perintis
5	Tia	45	Jln. Perintis
6	Dedek	25	Jln. Raya Sialang
7	Aisyah	32	Jln. Nusantara
8	Habib	28	Jln. Raya Sialang

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dilakukan pengambilan informasi secara langsung
2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
   a. Data Primer

      Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Penelitian menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang Analisis Dampak Program Kartu Prakerja dalam meningkatan Kesejahteraan masyarakat penerima yaitu dengan cara wawancara langsung kepada masyarakat yang ada di Nagari Muaro Paiti.

   b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, note, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah, dari berbagai organisasi, hasil-hasil studi, hasil survey dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan masyarakat sekitar.[32]

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder seperti berikut ini:

1. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab antara pewawancara dengan yang mewawancara untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan (*interviewer*) dan pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan

[32] Kaharuddin, K. (2021). Kualitatif: ciri dan karakter sebagai metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, *9*(1), 1-8.

pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan pada masyarakat penerima program prakerja yang ada di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari buku, literatur review, jurnal dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.
3. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.[33]

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini menggunakan 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong analisis data adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan bukan berupa angka, selebihnya data tambahan seperti dokumen lain-lain.[34]

1. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan pihak

[33] Laia, Y., Sarumaha, M. S., & Laia, B. (2022). Bimbingan konseling dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa di SMA Negeri 3 Susua tahun pelajaran 2021/2022. *Counseling For All: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, *2*(1), 1-12.

[34] Suryantoro, B., & Kusdyana, Y. (2020). Analisis kualitas pelayanan publik pada Politeknik Pelayaran Surabaya. *Jurnal Baruna Horizon*, *3*(2), 223-229.

peneliti untuk dapat mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan penelitian yang mereka ambil. Prosedur ini sangat penting supaya data yang akan didapatkan dalam sebuah penelitian berbentuk data yang utuh, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid.

Mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, merekam, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Redaksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak dan kompleks. Mereduksi data berarti memfokuskan pada hal yang penting, merangkum, dan memilih hal- hal yang pokok, serta mencari tema dan polanya.

3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi yang telah tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dilakukan penyajian data dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harusdilakukan berdasarkan pemahaman-pemahaman yang diperoleh.

4. Penarikan kesimpulan

Proses ini merupakan kegiatan yang sudah dilakukan sejak

pengumpulan data. Kesimpulan akan diverifikasi selama penelitian berlangsung sebagai tinjauan ulang pada catatan yang ada sebelumnya. Penelitian ini peneliti mulai mengeksplorasi semua hal yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.[35]

[35] Suryantoro, B., & Kusdyana, Y. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya. *Jurnal Baruna Horizon*, *3*(2), 223-229.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota

Muaro Paiti merupakan salah satu nagari yang berada di kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 kota, Sumbar, sekaligus menjadi ibu kota kecamatan Kpur IX. Nagari ini pada awalnya memiliki dua jorong jorong kampung dalam dan kampung baru dan sampai sekarang terus terjadi perubahan dan pemekaran sehingga menjadi enam jorong yaitu:

a. Jorong Kampung Dalam Muaro Paiti
b. Jorong kampung Baru muaro Paiti
c. Jorong Kampung Duri
d. Jorong Sungai Panjang Indah
e. Jorong Kampung Talawi
f. Jorong Koto Tinggi

Sebelum tergabung menjadi Kenagarian Muaro Paiti, Kedua Jorong tersebut, masing-masing dipimpin Kepala Desa/Wali Jorong, yaitu Masli S, (Jorong/Desa Kampung Dalam) dan Yurnalis Ilyas (Jorong/Desa Kp.Baru). Namun, seiring meningkatnya semangat kebersamaan, maka kedua desa/Jorong tersebut di gabungkan menjadi Kenagarian Muaro Paiti.

Mayoritas penduduk nagari yang berada 200 km dari Kota Padang ini bekerja sebagai petani gambir. Selain itu, mata pencaharian yang lain yaitu

perkebunan karet. Nagari muaro paiti juga telah banyak menciptakan usahawan - usahawan dan profesional muda yang sukses di perantauan pada bidangnya masing-masing. seperti di kota padang, seorang putra asli muaro paiti di kenal dengan salah seorang dari 2 pendiri Distro tangkelek yang merupakan salah satu kaos icon oleh-oleh sumatera barat.

Meski Kenagarian Muaro Paiti lokasinya relatif jauh atau terpencil dari daerah lainnya di Kabupaten 50 kota, tetapi nagari yang indah dengan penduduk yang ramah ini, memiliki masyarakat pekerja keras, sehingga nagarinya tidak tetap bisa mengimbangi kemajuan-kemajuan dari daerah lain, di Nagari Muara Paiti terdapat sekurangnya lima sekolah dasar (SD), Diantaranya SD N 01 di jorong Kampung Dalam, SD N 02 di jorong Aur Duri, SD N 03 di jorong Sungai Panjang Indah, SD N 04 di jorong Talawi dan SD N 05 di jorong Sungai panjang indah. satu SMP,yaitu SMP pertama di Kapur IX dengan nama SMP N 1 Kapur IX terletak di jorong Koto Tinggi. dan satu-satunya SMA, yaitu SMA N 1 Kapur IX terletak di Jorong Sungai Panjang Indah yang dapat menampung tingginya animo masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas.

2. Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Nagari Muaro Paiti

   a. Wali Nagari

      Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Wali Nagari mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Nagari, Pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upayah perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2) Melaksanakan pembangunan, seperti, pemabngunan darana prasarana nagari, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3) Pembinaan kemasyrakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Nagari

Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Nagari mempunyai fungsi, yaitu sebagai berikut :

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naska, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengaministrasian aset, investarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan wali nagari, perangkat nagari,Bamus Nagari, dan lembaga pemerintahan nagarilainnya.

c. Kepala Urusan

Kepala urusan bekedudukan sebagai staff sekretariat yang mempunyai tugas membantu sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naska, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengaministrasian aset, investarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,

verifikasi administrasi keuangan,dan administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari, dan lembaga pemerintahan nagari lainnya.

3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mrngkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran, pendapatan dan belanja nagari, menginvestarisir data-data dalam rangaka pembangunan, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis yang bertugas membantu Wali Nagari sebagai pelaksanaan tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil nagari.

2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana nagari, pembangunana bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

3) Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, menigkatkan partisipasi masyarakat, serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan dinagari.

e. Wali Jorong

Wali jorong berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Wali Jorong mempunyai fungsi, sebagai berikut :

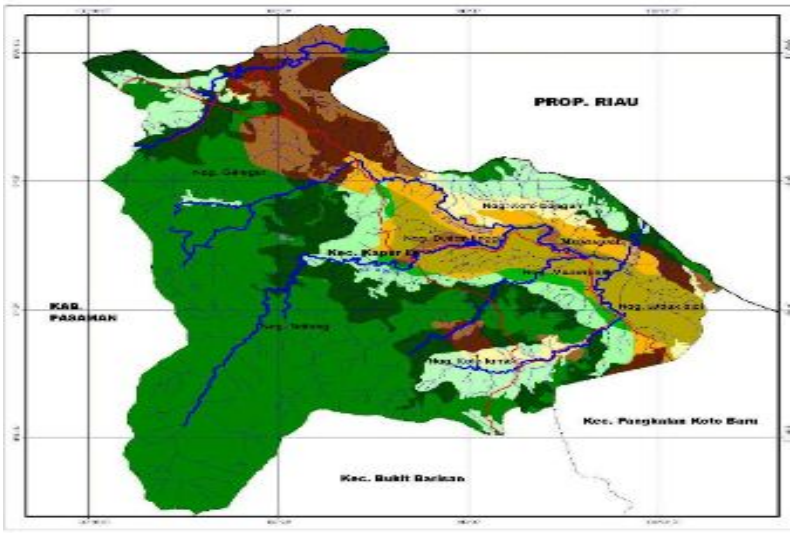
1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upayah pelindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3) Melaksanaan pembinaan kemasyrakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4) Melakukan upayah-upayah pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3. Keadaan Geografis

Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki curah hujan rata-rata mencapai 2.537,86 mm3 /tahun. Dengan kondisi daerahnya pun masih banyak hutan yang belum pernah

dipergunakansebelumnya yang terdiri dari perbukitan dan dataran rendah serta lahannya yang bergelombang.

Gambar 4.1
Peta Keadaan Geografis di Nagari Muaro Paiti



Jika dilihat dari bentang wilayah, Nagari Muaro Paiti berbatasan dengan :

a. Utara : Kampar
b. Selatan : Koto Lamo
c. Barat : Koto Bangun
d. Timur : Lubuk Alai

4. Keadaan Penduduk Nagari Muaro Paiti

a. Jumlah Penduduk

Jika berbicara tentang ekonomi maka tidak akan bisa dipisahkan dengan yang namanya penduduk karena penduduk merupakan bagian

yang paling penting dalam kegiatan ekonomi sekaligus sebagai pelaku pembangunan dan sasaran pembangunan. Artinya penduduk merupakan objek dari pembangunan itu sendiri dan merupakan modal yang efektif bagi pembangunan Nasional. Jika penduduk atau yang sering disebut Sumberdaya Manusia (SDM) memiliki kualitas yang baik maka pembangunan akan lamban dan memakan waktu yang sangat lama untuk bisa maju.

Tanpa diikuti peningkatan kualitas yang baik, peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya tidak akan ada artinya bahkan menjadi beban tanggungan. Tetapi antara peningkatan jumlah penduduk dengan peningkatan kualitas SDM sejalan mengalami peningkatan maka itu akan menjadi salah satu modal yang sangat besar bagi pembangunan.

Jumlah penduduk juga merupakan salah satu faktor dalam proses produksi. Karena faktor tenaga kerja yang bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa berasal atau bersumber dari penduduk itu sendiri. Mereka yang akan melakukan 60 proses produksi tersebut baik dari tenaga maupun pengendalian mesin ataupun sumbangan fikiran.

Berdasarkan data jumlah penduduk Nagari Muaro Paiti berdasarkan sensus penduduk tahun 2017 bahwa Nagari Muaro Paiti mempunyai penduduk sebanyak 5.776 jiwa. Yang terdiri dari 3.003 jiwa laki-laki dan 2.773 jiwa perempuan yang berasal dari 1.722 rumah tangga. Dan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 3 orang.

b. Perkembangan Penduduk

Selain penduduk sebagai objek pembangunan, penduduk juga merupakan subjek pembangunan sekaligus konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan. Nagari Muaro Paiti merupakan salah satu Nagari yang berada antara 7 Nagari yang ada di Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat. Nagari Muaro Paiti merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Kapur IX yang mempunyai luas 9.536 Ha dengan jumlah KK sebanyak 1.698 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 5.776 jiwa.

Jumlah penduduknya dari tahun ke tahun Muaro Paiti selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk yang sebagian dari jumlah penduduknya merupakan petani gambir. Perbandingan jumlah penduduk Nagari Muaro Paiti dengan jumlah penduduk Kecamatan Kapur IX adalah 19,84%. Artinya rata-rata jumlah penduduk Muaro Paiti mencapai 19,84% dari jumlah penduduk keseluruhan Kecamatan Kapur IX tinggal di Muaro Paiti.

c. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam keberhasilan ekonomi. Skill yang sangat diharapkan ada pada setiap tenaga kerja, apalagi dalam masa pembangunan sekarang ini menuju ke arah industrialisasi. Untuk melihat gambaran tingkat pendidikan penduduk Nagari Muaro Paiti dapat kita lihat pada Tabel:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Nagari Muaro Paiti

No	Pendidikan Terakhir	Jiwa (Orang)	Persentase (%)	
1	Belum sekolah karena belum masuk usia SD	677	11,27	
2	Masih SD	800	13,85	
3	Tidak tamat SD	555	9,61	
4	Tamat SD	999	17,30	
5	Masih SLTP	384	6,65	
6	Tamat SLTP	818	14,16	
7	Masih SLTA	328	5,68	
8	Tamat SLTA	643	11,13	
9	Masih Sekolah AK/PT	234	4,05	
10	Tamat AK/PT	282	4,88	
11	Tidak pernah sekolah	56	0,97	
	Jumlah	5,776	100	

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat sebagian besar penduduk Nagari Muaro Paiti saat ini tingkat pendidikan terakhir tamat SD sebanyak 999 orang dari 5.776 jumlah penduduk Nagari Muaro Paiti tahun 2017, atau 17,30%. Dan yang tamat SLTP 818 orang atau 14,16 %, 13,85% yang masih SD (sekolah dasar) atau 800 orang. Yang belum sekolah 677 orang atau 11,72%, tidak tamat SD 555 orang atau 9,61%, 6,65 % yang masih SLTP atau 384, untuk yang masih SLTA baik itu SMA,SMK sebanyak 328 orang atau 5,68% dari jumlah penduduk, 11,13 % yaitu 643 orang yang tamat SLTA, 4,05% masih sekolah AK/PT atau 282 orang, dan yang paling sedikit adalah yang tidak pernah bersekolah sebanyak 56 orang atau 0.97%.

d. Mata Pencarian Penduduk

Umumnya mata pencaharian penduduk Nagari Muaro Paiti adalah petani, tetapi masih ada penduduk yang memiliki profesi selain sebagai petani, yaitu berdagang, dan bidang jasa. Dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Penduduk Nagari Muaro Paiti Menurut Mata Pencaharian

Jenis Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
Pegawai Pemerintah	205	3,55
Pegawai Swasta	166	2,87
Petani	1.142	19,77
Pensiun	101	1,75
Usaha Sendiri	560	9,70
Tidak Bekerja	3.283	56,84
Lainnya	319	5,52
Jumlah	5.776	100

Dari Tabel 4.2 dapat kita lihat bahwa pada umumnya masyarakat Nagari Muaro Paiti pada umumnya bekerja sebagai petani sebanyak 1.142 orang atau 19,77%. Diluar yang tidak bekerja baik itu orang tua,anak-anak yang masih sekolah atau yang belum sekolah. Yang membuka usaha sendiri sebanyak 560 orang atau 9,70%.

B. Dampak Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

1. Memberikan keringanan atas biaya pelatihan

Memberikan keringanan atas biaya pelatihan dalam program Kartu Prakerja merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang terdampak ekonomi, memiliki

akses yang setara terhadap peningkatan keterampilan dan peluang kerja. Keringanan ini dapat berupa potongan harga, subsidi langsung, atau bahkan pelatihan gratis yang diberikan kepada peserta dengan kondisi tertentu, seperti pengangguran, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), atau masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya adalah untuk mengurangi hambatan finansial yang mungkin menghalangi individu dalam mengikuti pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan keringanan biaya ini, diharapkan lebih banyak peserta dapat mengikuti pelatihan secara optimal, meningkatkan kualitas SDM, dan memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan usaha mandiri. Selain itu, langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan kesempatan dan inklusi sosial di sektor ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Iya, sangat membantu. Biasanya kan namanya pelatihan itu pasti mahal, tapi dengan Prakerja saya bisa ikut tanpa keluarkan biaya. Dan juga Saya ikut pelatihan administrasi kantor secara gratis."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwan sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Sebelum saya ikut Prakerja ini, dulu saya sempat ingin ambil kursus komputer, tapi karena biayanya mahal saya tidak jadi mengambilnya. Setelah dapat Kartu Prakerja, saya bisa ikut pelatihan secara gratis. Prakerja ini sangat membantu saya, apalagi saya belum punya penghasilan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alfiano sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Dulu setelah saya kena PHK, saya bingung mau ikut pelatihan karena nggak punya uang, untung ada Prakerja yang biayai pelatihannya. Saya ikut pelatihan tanpa mengeluarkan biaya sepersenpun, dan sekarang saya biasa mengikuti pelatihan dengan gratis."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Saya kerja serabutan, jadi penghasilan nggak menentu. Saya ingin punya usaha sendiri tapi perlu belajar dulu. Alhamdulillah, dengan adanya Prakerja saya bisa ikut pelatihan UMKM tanpa harus bayar. Tetapi saya dulu memiliki keluhan keterbatasan berinteraksi dalam pelatihan daring dan serta kurangnya pendampingan setelah pelatihan selesai."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Tia sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Saya bisa ikut pelatihan digital marketing yang seharusnya mahal, tapi lewat Prakerja saya cukup daftar dan pelatihan sudah dibiayai, jadi menurut saya dengan adanya kartu prakerja sangat terasa bagi saya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kakak Dedek sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Saya baru lulus kuliah, saya ingin belajar lagi biar cepat kerja. Tetapi pelatihan yang tersedia di prakerja masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri atau peluang kerja yang ada di nagari ini. ."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Aisyah sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Pelatihan memasak yang saya ikuti awalnya saya kira mahal, tapi dengan Kartu Prakerja semuanya ditanggung. Saya jadi bisa belajar sambil mengurus rumah, dan sekarang mulai jualan makanan kecil."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abang Habib sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Dulu saya pernah berpikir dengan Gaji yang pas-pasan nggak memungkinkan ikut pelatihan mandiri. Tapi dengan Kartu Prakerja, saya bisa ikut pelatihan teknik dasar dari berbagai macam pelatihan. Biayanya gratis dan saya dapat ilmu baru."

2. Membantu pengurangan biaya dalam mencari inforamasi pelatihan

Membantu pengurangan biaya dalam mencari informasi pelatihan merupakan langkah strategis untuk mempermudah akses masyarakat terhadap program pengembangan keterampilan. Banyak individu, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat dan relevan mengenai pelatihan yang tersedia karena keterbatasan akses terhadap teknologi, internet, atau sumber informasi lainnya. Oleh karena itu, penyediaan informasi pelatihan yang mudah dijangkau, gratis, dan terintegrasi — seperti melalui platform digital resmi Kartu Prakerja, pusat layanan informasi, atau kerja sama dengan lembaga pelatihan — sangat penting untuk mengurangi beban biaya pencarian informasi. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga,

tetapi juga mencegah peserta tertipu oleh informasi palsu atau tidak terpercaya. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih fokus memilih pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mendapatkan informasi awal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

“Iya, sangat mudah untuk mencari informasi pelatihan prakerja. Di dashboard Prakerja sudah ada daftar pelatihannya lengkap, jadi saya tdiak susah cari-cari sendiri di internet atau datang ke tempat pelatihan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwan sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Dulu saya sangat bingung cari info kursus, kadang harus tanya orang atau browsing lama. Sekarang dengan adanya prakerja, semua informasi pelatihan sudah tersedia dan jelas, jadi hemat waktu dan uang juga."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alfiano sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

“ *Dulu saya sering tanya-tanya ke teman karena saya kurang mengerti dalam mencari informasi pelatihan dan juga jaringan waktu itu di tempat saya tinggal kurang bagus, sehingga saya harus pergi ke kota agar bisa dapat jaringan yang bagus* .”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan

Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Dulu saya sempat bingung untuk mencari informasi pelatihan. Karena informasi yang tersedia terlalu banyak dan tidak teratur dengan baik, itu membuat saya kebingungan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Tia sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Iya, sangat ini sangat membantu saya. Sekarang saya tidak perlu keluar rumah atau bayar untuk tanya-tanya. Tinggal buka aplikasi, semua jenis pelatihan ada, dan bisa pilih yang saya butuhkan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kakak Dedek sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Iya, informasi yang dikasih lengkap dan terpercaya. Jadi saya nggak buang waktu dan uang buat cari info ke tempat lain."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Aisyah sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Jelas sangat membantu saya. Sekarang saya tidak perlu keluar biaya yang banyak buat browsing. Dimana sudah tersedia semua info pelatihan yang saya perlukan di aplikasi."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abang Habib sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Iya, sekarang saya jadi tahu pelatihan apa saja yang tersedia dan cocok buat saya. Semua sudah ada di satu tempat, jadi lebih hemat dan tidak susah."

3. Mendorong untuk bekerja

Program Kartu Prakerja mendorong masyarakat untuk bekerja dengan memberikan akses pelatihan yang relevan dan insentif yang memotivasi pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan mereka. Melalui program ini, peserta mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mereka lebih siap dan percaya diri dalam memasuki dunia kerja atau memulai usaha sendiri. Selain pelatihan, program ini juga memberikan insentif berupa bantuan biaya yang dapat digunakan sebagai penunjang selama masa pelatihan dan pencarian kerja. Dengan adanya dukungan ini, peserta terdorong untuk lebih proaktif dalam mencari peluang kerja atau merintis usaha, karena mereka merasa difasilitasi dan tidak sendirian dalam proses pengembangan diri. Program ini juga berperan sebagai jembatan antara pencari kerja dan pasar kerja, menciptakan konektivitas yang lebih efektif dalam menyalurkan tenaga kerja ke sektor-sektor yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Setelah saya ikut pelatihan dari Prakerja, saya jadi tertarik untuk buka usaha sendiri di rumah. Sekarang saya bisa membantu memenuhi ekonomi keluarga saya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwan sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"*Iya, saya sekarang jadi punya banyak ide dan keahlian tambahan. Dulu cuma ngandalkan satu jenis pekerjaan, sekarang bisa ambil berbagai proyek yang ada*."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alfiano sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Sangat mendorong bagi saya. karena setelah adanya pelatihan, saya langsung mencari kerja lagi. Tetapi dulu saya merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan meskipun sudah memiliki sertifikat pelatihan, karena di daerah sini sangat terbatas lapangan pekerjaannya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Ya. Saya dulunya hanya kerja serabutan, tapi setelah ikut pelatihan di prakerja, saya jadi membuka jasa sendiri. Program ini bikin saya semangat usaha."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Tia sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Saya dulu nggak kepikiran kerja, tapi setelah saya ikut pelatihan bisnis online dari prakerja, saya jadi membuka usaha kecil dari rumah. Jadi lebih semangat menghasilkan uang sendiri."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kakak Dedek sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Iya, karena setelah saya ikut pelatihan saya jadi punya keahlianx baru. Sehingga saya perlu bimbingan lanjutan pelatihan atau kesempatan magang, agar saya bisa menjadi lebih percaya diri melamar kerja dan nggak minder."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Aisyah sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Iya, saya banyak belajar bagaimana cara jualan online lewat pelatihan. Sekarang saya bisa jualan lewat media sosial dan mulai ramai orang membeli makanan saya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abang Habib sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Iya, dengan adanya prakerja saya jadi punya skill tambahan seperti desain dan editing. Saya jadi semangat kirim lamaran dan juga ambil kerja freelance."

4. Menjadi tambahan dari pendidikan formal

Program Kartu Prakerja berfungsi sebagai pelengkap atau tambahan dari pendidikan formal dengan menyediakan pelatihan praktis yang fokus pada keterampilan kerja dan kewirausahaan. Berbeda dengan pendidikan formal yang lebih menekankan pada teori dan pengetahuan akademis, program Prakerja memberikan pelatihan yang aplikatif dan langsung dapat digunakan di dunia kerja. Hal ini sangat bermanfaat bagi lulusan sekolah atau perguruan tinggi yang belum memiliki pengalaman kerja atau keterampilan spesifik yang dibutuhkan industri. Dengan mengikuti pelatihan dari program ini, peserta dapat memperluas kompetensi mereka, menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar, dan meningkatkan daya saing di

dunia kerja. Program ini juga memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak sempat melanjutkan pendidikan formal untuk tetap bisa memperoleh keterampilan yang relevan dan berkualitas. Dengan demikian, Kartu Prakerja menjadi solusi alternatif yang melengkapi jalur pendidikan formal dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan siap kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima *Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:*

"Iya. Setelah saya lulus, saya sempat bingung mau kerja apa. Sehingga Lewat Prakerja, saya ikut pelatihan kewirausahaan dan sekarang saya coba buka usaha kecil."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwan sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Iya, dengan adanya pelatihan di prakerja menambah skill yang nggak saya dapat di sekolah. Saya mengikui pelatihan digital marketing di prakerja, karena itu sangat bermanfaat untuk kerja nanti."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alfiano sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Iya, saya sudah lama sekali lulus. Lewat Prakerja ini, saya banyak belajar hal yang baru yang sesuai dengan kemampuan saya seperti pekerjaan saya sekarang. Jadi ilmu yang saya dapat di prakerja sangat membantu saya untuk keahlian dan kemampuan saya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan

Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Jelas sangat membantu saya. Dulu saya nggak sempat kuliah, tapi dengan Prakerja saya bisa ikut pelatihan online yang bagus dan gratis. Jadi nambah ilmu meski bukan di bangku kuliah."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Tia sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Iya, sangat penting. Saya dulu di sekolah dulu tidak pernah di ajarkan cara berbisnis apalagi buka usaha sendiri, tapi lewat Prakerja saya bisa perdalam ilmu dan kemampuan saya lebih dalam lagi."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kakak Dedek sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Iya, dunia kuliah saya banyak teori. Lewat Prakerja ini, saya banyak mendapatkan pelatihan praktis seperti cara menghadapi wawancara dan membuat CV yang menarik."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Aisyah sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Iya, saya belajar hal-hal teknis yang nggak diajarkan di bangku sekolah, seperti cara menjalankan bisnis online dan mengelola keuangan pribadi dengan benar."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abang Habib sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Manfaatnya besar untuk saya. karena Saya bisa belajar public speaking dan manajemen waktu dari pelatihan Prakerja. Ini sangat berguna untuk saya dalam dunia kerja saya saat ini."

5. Membantu peningkatakan daya beli masyarakat

Membantu peningkatan daya beli masyarakat berarti mendorong agar masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang, maupun kebutuhan lainnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja, menaikkan upah minimum, serta memberikan bantuan sosial atau subsidi. Selain itu, menjaga kestabilan harga barang dan jasa juga penting agar penghasilan masyarakat tidak tergerus oleh inflasi. Pemerintah dan lembaga terkait biasanya berperan dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang mendukung, seperti pengurangan pajak untuk kelompok berpenghasilan rendah atau program pemberdayaan usaha kecil. Semua langkah ini bertujuan agar daya beli masyarakat meningkat, yang pada gilirannya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Iya. Dulu penghasilan yang saya dapatkan tidak tetap. Setelah ikut pelatihan dan dapat insentif, saya bisa belanja tanpa harus meminjam terlebih dahulu."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwan sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"*Iya, saya jadi bisa ambil proyek desain dari internet. Penghasilan saya menjadi bertambah dan saya bisa beli barang-barang yang sebelumnya saya tunda*."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alfiano sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur Ix Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Iya. Setelah saya ikut pelatihan, saya bisa bekerja dengan kemampuan dah keahlian saya. Sehingga Penghasilan saya bertambah dan saya bisa belanja kebutuhan keluarga tanpa ngutang lagi."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Dampaknya bagi saya sangat besar. Uang insentif yang dapat di prakerja saya gunakan buat beli bahan makanan dan bayar listrik. Saya merasa terbantu dan tidak terlalu terbebani lagi."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Tia sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Setelah saya ikut pelatihan bisnis online di prakerja, penjualan saya semakin hari semakin naik. Sehingga dengan penghasilan tambahan, saya bisa belanja kebutuhan rumah tangga saya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kakak Dedek sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Iya, saya jadi bisa memenuhi kebutuhan saya seperti beli paket data, alat tulis, perlengkapan untuk melamar kerja dan makanan sendiri. Biasanya harus minta orang tua, sekarang bisa dari uang insentif."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Aisyah sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Iya, sangat membantu bagi saya. Karena setelah saya ikut pelatihan, saya dapat uang insentif, dan itu bisa saya gunakan untuk beli kebutuhan dapur. Sehingga daya beli saya jadi meningkat."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abang Habib sebagai penerima bantuan program prakerja di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, di rumah tempat tinggalnya menyatakan:

"Insentifnya sangat membantu untuk saya .karena sekarang Saya bisa beli makan, transportasi, dan alat kerja pakai uang saya sendiri. Jadi nggak cuma belajar aja terbantu, tapi hidup sehari-hari juga terbantu adanya prakerja ini."

C. ANALISIS PENULIS

1. Dapat memberikan keringanan untuk biaya pelatihan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber di Nagari Muaro paiti, diperoleh gambaran bahwa pemberian keringanan atas biaya pelatihan sangat diapresiasi dan dianggap sebagai langkah strategis dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa tanpa adanya keringanan biaya, mereka kemungkinan besar tidak mampu mengikuti

pelatihan karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, mereka menyatakan bahwa program pelatihan kini menjadi lebih kompetitif dalam hal kualitas, karena peserta menjadi lebih selektif dalam memilih pelatihan yang benar-benar bermanfaat.

Namun, beberapa catatan kritis juga muncul dari wawancara tersebut. Yang dimana sebagian peserta merasa bahwa pilihan pelatihan yang tersedia masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri atau peluang kerja yang ada di daerah tempatnya tinggal. Selain itu, ada keluhan tentang keterbatasan interaksi dalam pelatihan daring dan kurangnya pendampingan setelah pelatihan selesai. Oleh karena itu, beberapa narasumber yang ada di Nagari Muaro Paiti menyarankan agar selain memberikan keringanan biaya, pemerintah dan penyelenggara juga perlu meningkatkan kualitas materi, metode penyampaian, serta memperkuat akses ke dunia kerja atau peluang usaha setelah pelatihan.

Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemberian keringanan biaya pelatihan memiliki dampak positif yang besar, namun tetap memerlukan evaluasi dan penyempurnaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal dan berkelanjutan.

2. Dapat pengurangan dalam mencari informasi pelatihan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber yang ada di Nagari Muaro Paiti banyak peserta menyatakan bahwa informasi pelatihan kini lebih mudah diakses dan tidak membutuhkan biaya tambahan yang besar. Beberapa narasumber menyebut

bahwa keberadaan media sosial dan grup komunitas online juga sangat membantu dalam menyebarkan informasi secara cepat dan gratis. Ini menunjukkan bahwa transformasi digital menjadi salah satu faktor utama dalam mengurangi beban biaya pencarian informasi pelatihan.

Meski demikian, hasil wawancara juga menunjukkan adanya tantangan narasumber dari daerah terpencil atau dengan keterbatasan akses internet mengaku masih kesulitan mengakses informasi pelatihan secara digital. Selain itu, sebagian peserta merasa bingung karena informasi yang tersedia terlalu banyak dan tidak terorganisasi dengan baik, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan pelatihan yang paling relevan. Oleh karena itu, para narasumber menyarankan perlunya peningkatan dalam penyediaan informasi yang lebih terstruktur, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi biaya dalam mencari informasi pelatihan telah memberikan dampak positif, namun masih ada ruang perbaikan dalam hal penyebaran informasi yang merata dan efektif di seluruh lapisan masyarakat.

3. Mendorong masyarakat agar untuk bekerja

Hasil wawancara dengan peserta Program Kartu Prakerja menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak yang cukup signifikan dalam mendorong masyarakat untuk kembali atau mulai bekerja, baik sebagai karyawan maupun wirausahawan. Beberapa Narasumber di Nagari Muaro Paiti menyampaikan bahwa insentif pelatihan yang diberikan melalui

program ini memberi mereka semangat baru dan motivasi untuk meningkatkan keterampilan diri, terutama setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kesulitan mencari pekerjaan.

Peserta mengaku bahwa pelatihan yang mereka ikuti tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri untuk bersaing di dunia kerja. Beberapa menyebut bahwa materi pelatihan seperti keterampilan digital, kewirausahaan, atau pelatihan komunikasi kerja sangat bermanfaat untuk menunjang kesiapan mental dan profesionalisme saat melamar pekerjaan. Tak sedikit pula yang merasa terdorong untuk memulai usaha kecil setelah mendapatkan pelatihan serta pemahaman dasar tentang bisnis.

Namun demikian, wawancara juga mengungkap beberapa tantangan. Sebagian peserta merasa masih sulit mendapatkan pekerjaan meskipun sudah memiliki sertifikat pelatihan, terutama di wilayah dengan lapangan kerja terbatas. Selain itu, beberapa narasumber menyebut perlunya bimbingan lanjutan pasca-pelatihan, seperti *job matching*, pelatihan lanjutan, atau kesempatan magang agar proses transisi ke dunia kerja bisa lebih efektif.

Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja berperan penting dalam mendorong masyarakat untuk bekerja dengan cara memberikan akses terhadap pelatihan dan insentif, serta membangun kembali kepercayaan diri peserta. Meskipun masih ada tantangan teknis dan struktural, program ini dinilai sebagai langkah strategis

untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja.

4. Bisa mendapatkan tambahan pendidikan formal

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Program Kartu Prakerja di Nagari Muaro Paiti, dapat disimpulkan bahwa program ini dipandang sebagai pelengkap yang sangat bermanfaat dari pendidikan formal yang sebelumnya mereka tempuh. Mayoritas narasumber menyatakan bahwa pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh program ini memberikan pengetahuan praktis dan keterampilan teknis yang tidak mereka dapatkan selama duduk di bangku sekolah atau kuliah.

Beberapa peserta mengungkapkan bahwa mereka baru memahami keterampilan seperti mengelola keuangan usaha, membuat CV profesional, atau memasarkan produk secara digital setelah mengikuti pelatihan dari Prakerja. Hal ini menunjukkan bahwa program ini mampu mengisi kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja saat ini. Bahkan, sejumlah narasumber yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi merasa bahwa pelatihan Prakerja membantu mereka lebih siap bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif dan cepat berubah. Selain itu, peserta dari latar belakang non-akademis seperti lulusan SMA atau bahkan yang tidak menyelesaikan pendidikan formal merasa sangat terbantu karena Prakerja memberikan akses yang merata tanpa mempersyaratkan jenjang pendidikan tertentu. Hal ini membuat mereka bisa mendapatkan tambahan

pengetahuan yang sebelumnya sulit diakses karena keterbatasan ekonomi atau lokasi geografis.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja dinilai berhasil memberikan tambahan nilai yang signifikan terhadap pendidikan formal. Program ini mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta membuka peluang pembelajaran seumur hidup (*lifelong learning*) yang sangat penting di era digital dan pasar kerja yang dinamis.

5. Dapat Membantu peningkatan daya beli masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan para peserta Program Kartu Prakerja Di Nagari Muaro Paiti, ditemukan bahwa program ini memberikan kontribusi nyata dalam membantu peningkatan daya beli masyarakat, khususnya bagi mereka yang sebelumnya kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan tetap. Sebagian besar Narasumber yang ada di Nagari Muaro Paiti menyatakan bahwa insentif tunai yang diberikan setelah menyelesaikan pelatihan sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli bahan pokok, membayar tagihan, atau digunakan sebagai modal usaha kecil. Bantuan ini memberikan ruang bernapas bagi peserta, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit, seperti masa pandemi atau pasca-PHK.

Selain itu, peserta juga mengungkapkan bahwa pelatihan yang mereka ikuti melalui Kartu Prakerja membuka peluang baru untuk memperoleh

penghasilan. Banyak yang berhasil mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan digital, komunikasi, atau kewirausahaan. Bahkan, beberapa peserta memulai usaha rumahan, seperti menjual makanan, membuka jasa desain, atau menjadi reseller online. Pendapatan baru ini secara langsung meningkatkan daya beli mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan keluarga atau utang.

Secara keseluruhan, wawancara menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat, baik melalui bantuan finansial langsung maupun peningkatan keterampilan kerja. Dengan pengelolaan dan evaluasi berkelanjutan, program ini berpotensi menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan memperkuat daya beli secara berkelanjutan.

D. ANALISIS SYARIAH

Dalam Islam, konsep kesejahteraan sosial memiliki landasan yang kuat dalam ajaran syariah dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tujuan utama syariat, yaitu *maqashid al-syariah*. Salah satu pilar penting dari maqashid adalah *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-mal* (menjaga harta), dan *hifzh al-'aql* (menjaga akal), yang seluruhnya berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Dalam konteks kehidupan sosial, syariah mengarahkan agar setiap individu memiliki hak untuk hidup layak, mendapatkan akses terhadap pekerjaan yang halal, memperoleh pendidikan, serta tidak terjebak dalam

kemiskinan atau pengangguran yang merusak martabat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 29: *"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu"*, yang menunjukkan bahwa sumber daya di bumi disediakan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, bukan hanya kelompok tertentu.

Dalam konteks kebijakan publik seperti program Kartu Prakerja, upaya pemerintah untuk menyediakan pelatihan, bantuan biaya, dan peluang kerja bagi masyarakat dapat dipandang sebagai implementasi nyata dari prinsip *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) yang menjadi asas dalam kebijakan syariah.

Program ini secara tidak langsung menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan membuka akses terhadap pekerjaan yang layak, khususnya bagi kelompok rentan yang terdampak krisis sosial atau ekonomi. Dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran sebagai *ra'in* (penjaga) dan *muwajjih* (pengarah) yang wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW: *"Imam (pemimpin) adalah pemelihara dan bertanggung jawab atas rakyatnya."* Maka dari itu, jika program Kartu Prakerja dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, serta ditujukan untuk mengangkat derajat masyarakat miskin dan penganggur agar produktif dan mandiri, maka program tersebut memiliki legitimasi kuat dalam pandangan syariah dan menjadi bagian dari ikhtiar negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai nilai-nilai Islam.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dapat disimpulkan dampak Program Kartu Prakerja ini dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat penerima sebagai berikut:

1. Program ini memberikan keringanan atas biaya pelatihan yang sebelumnya menjadi kendala bagi banyak pencari kerja dalam meningkatkan keterampilan mereka. Dengan adanya subsidi dari pemerintah, peserta dapat mengikuti pelatihan yang relevan secara lebih terjangkau.
2. Program ini juga membantu mengurangi beban biaya dalam mencari informasi pelatihan. Melalui platform digital yang terintegrasi, peserta dapat dengan mudah mengakses informasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Kemudahan akses ini turut mendorong peningkatan partisipasi dalam pelatihan kerja.
3. Program Prakerja turut mendorong motivasi individu untuk bekerja, baik sebagai pekerja formal maupun informal. Dengan keterampilan yang diperoleh, banyak peserta menjadi lebih percaya diri dan siap untuk memasuki dunia kerja atau membuka usaha secara mandiri.
4. Program ini juga menjadi pelengkap yang efektif bagi pendidikan formal. Pelatihan yang bersifat praktis dan aplikatif membantu mengisi

kesenjangan antara pendidikan akademik dan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

5. Dampak ekonomi dari program ini juga terlihat dalam peningkatan daya beli masyarakat. Bantuan insentif yang diberikan setelah mengikuti pelatihan memberikan suntikan dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga turut membantu dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.

Secara keseluruhan, program Kartu Prakerja berperan penting dalam mendorong pembangunan manusia yang lebih produktif dan adaptif terhadap dinamika pasar kerja modern.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka dapat di kemukakan saran sebagai berikut:

1. Memberikan Keringanan atas Biaya Pelatihan: Pemerintah sebaiknya menjalin kerja sama lebih luas dengan lembaga pelatihan untuk memberikan harga khusus bagi peserta Prakerja, atau menambah subsidi pelatihan bagi peserta dari kelompok rentan.
2. Membantu Pengurangan Biaya dalam Mencari Informasi Pelatihan: Disarankan agar platform Prakerja terus mengembangkan sistem pencarian pelatihan yang lebih personal dan mudah digunakan, serta memperkuat kolaborasi dengan layanan informasi gratis, termasuk media sosial dan komunitas lokal.
3. Mendorong Peserta untuk Segera Bekerja: Penulis menyarankan agar program Prakerja dilengkapi dengan layanan penyaluran kerja yang lebih

aktif, seperti bursa kerja daring, kerja sama dengan perusahaan, atau pelatihan kewirausahaan yang langsung terhubung ke pasar.

4. Menjadi Tambahan dari Pendidikan Formal: Pelatihan yang ditawarkan perlu terus dikembangkan agar sesuai dengan standar kompetensi industri, dan diakui secara lebih luas sebagai bagian dari rekam jejak pendidikan peserta.
5. Membantu Peningkatan Daya Beli Masyarakat: Untuk dampak yang lebih jangka panjang, pelatihan yang diberikan harus berorientasi pada peningkatan produktivitas, sehingga peserta dapat memperoleh pekerjaan atau penghasilan mandiri yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Dengan berbagai perbaikan tersebut, diharapkan Program Kartu Prakerja tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga berkontribusi nyata dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

Afriandy, A. (2010). Pengaruh Biaya Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tingkat Laba Perusahaan.

Christian, S., Ginting, B., & Ritonga, F. U. (2022). Tanggapan Masyarakat Penerima Manfaat Terhadap Penggunaan Manfaat Program Kartu Prakerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasar Doloksanggul: Bahasa Indonesia. *AQUACOASTMARINE: Journal of Aquatic and Fisheries Sciences*, *1*(1), 27-32.

Dayanti, P. R., & Prasetiyo, L. (2023). Peran UMKM CV Tas Rakyat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam Desa Ngampel. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Re*

DELFI, Y. (2023). *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Muslim (Studi Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Dewi, E. N. (2022). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Majalengka* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Dhuka, M. N. (2022). Perencanaan Strategis Mutu Pendidikan Agama Islam. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, *3*(4), 287-298.

Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *5*(2), 8-21.

Febrianti, F. (2021). *Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat kota medan berdasarkan standart kesejahteraan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Fitria, H. A. (2019). *analisis dampak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) terhadap kesejahteraan masyarakat (studi pada sentra industri kecil roti desa kalimalang kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Ginting, M. L. B., & Herdiyana, R. (2020). Peran pemerintah pada kebijakan kartu prakerja dalam memulihkan kesejahteraan pekerja di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Analis Kebijakan*, *4*(2), 1-15.

Hakim, A. B. D. U. R. R. O. H. M. A. N. (2022). *Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja Untuk Menangulangi Pengangguran di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur)* (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD").

Hamzah, I. R., & Khusnia, S. (2021). Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Sosial Teknologi*, *1*(1), 19-25.

Ilyas, R. (2016). Etika konsumsi dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *1*(1), 152-172.

INDRA, Y. A. (2021). *Pengelompokan Provinsi Di Indonesia Berdasarka Indikator Kesejahteraan Masyarakat Menggunakan Metode Algoritma Self Organizing Maps (SOM)* (Doctoral dissertation, UniversitasMuhammadiyahSemarang).

Kaharuddin, K. (2021). Kualitatif: ciri dan karakter sebagai metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, *9*(1), 1-8.

Laia, Y., Sarumaha, M. S., & Laia, B. (2022). Bimbingan konseling dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa di SMA Negeri 3 Susua tahun pelajaran 2021/2022. *Counseling For All: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, *2*(1), 1-12.

Malimbe, A., Waani, F., & Suwu, E. A. (2021). Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal ilmiah society*, *1*(1).

Massie, A. Y., & Nababan, K. R. (2021). Dampak pembelajaran daring terhadap pendidikan karakter siswa. *Satya Widya*, *37*(1), 54-61.

Memah, N. I., Rares, J. J., & Waleleng, G. J. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU PRAKERJA ERA PANDEMI COVID-19 DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, *18*(1), 247-254.

Muryadi, A. D. (2017). Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran)*, *3*(1).

Ningrum, H. S. (2022). Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, *11*(4), 160-171.

Purba, M. S., & Andiny, P. (2023). Analisis Indikator Kesejahteraan Masyarakat: Studi Komparatif Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Asahan. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, *1*(2).

Putra, R. M. (2021). Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Maslahat. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH*, *2*(3), 551-566.

Rachmah, D. S. (2020). *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Pra Kerja Di Kecamatan Medan Denai (Evaluasi Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 Tentang pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Rhadityo, S. (2022). Analisis daya beli masyarakat melalui program kartu prakerja di era pandemi COVID-19. *Jurnal Investasi Islam*, *7*(1), 14-19.

Septiyadi, M. R., & Rahayu, E. (2022). Program Kartu Prakerja Sebagai Program Pemberdayaan Di Bidang Ketenagakerjaan Di Tengah Pandemi. *Jurnal Pembangunan Manusia*, *3*(2), 5.

Soleh, A. (2017). Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, *6*(2), 83-92.

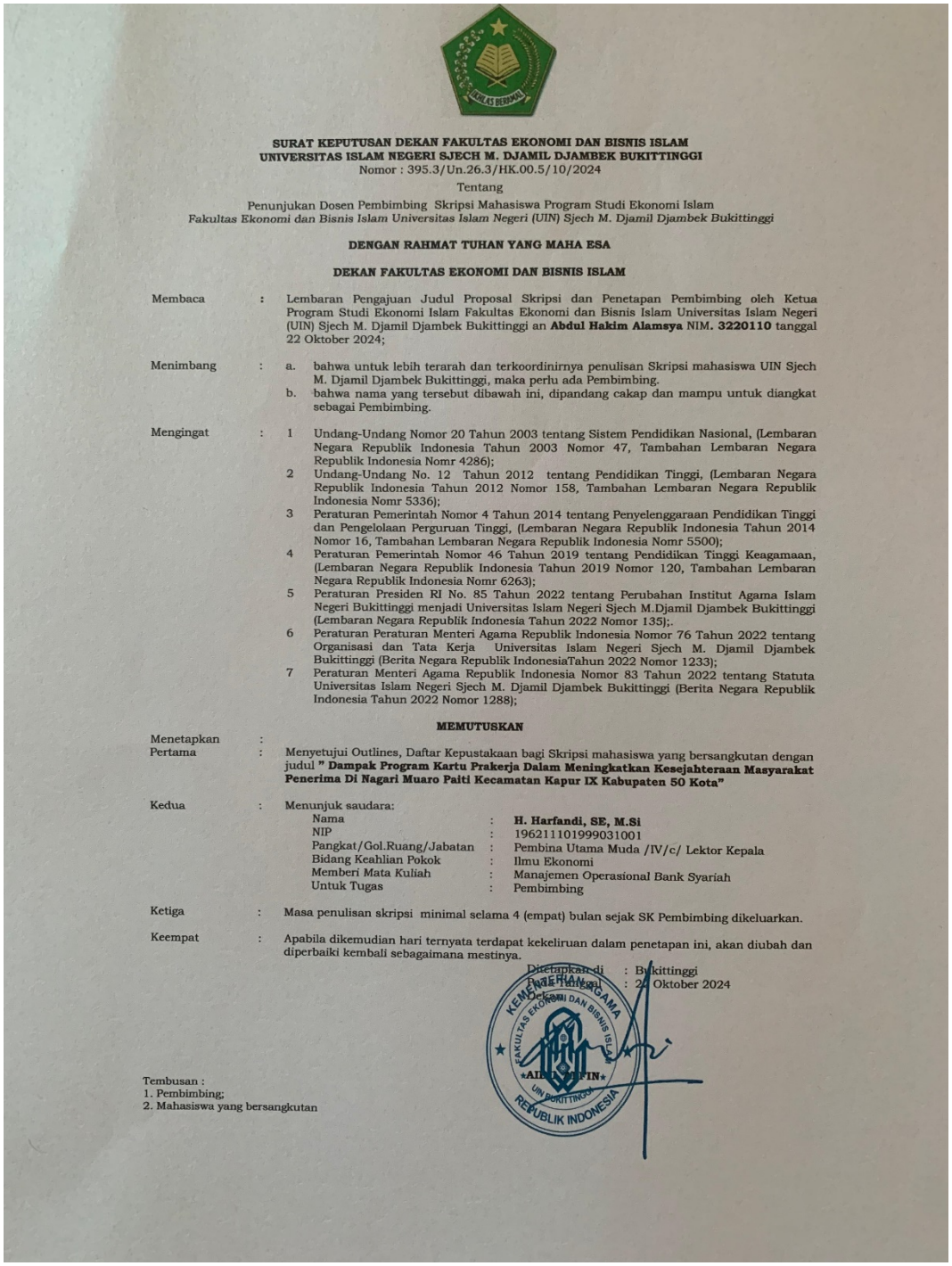
Sudiro, A., & Putri, O. A. (2023). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.

Suryantoro, B., & Kusdyana, Y. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya. *Jurnal Baruna Horizon*, *3*(2), 223-229.

Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.

Wulandari, H., Antasari, R. R., & Afriansyah, S. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. *Muamalah*, *7*(1), 204-226.

LAMPIRAN I SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 395.3/Un.26.3/HK.00.5/10/2024

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Abdul Hakim Alamsya** NIM. **3220110** tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Dampak Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**H. Harfandi, SE, M.Si**
NIP	:	196211101999031001
Pangkat/Gol.Ruang/Jabatan	:	Pembina Utama Muda /IV/c/ Lektor Kepala
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Manajemen Operasional Bank Syariah
Untuk Tugas	:	Pembimbing

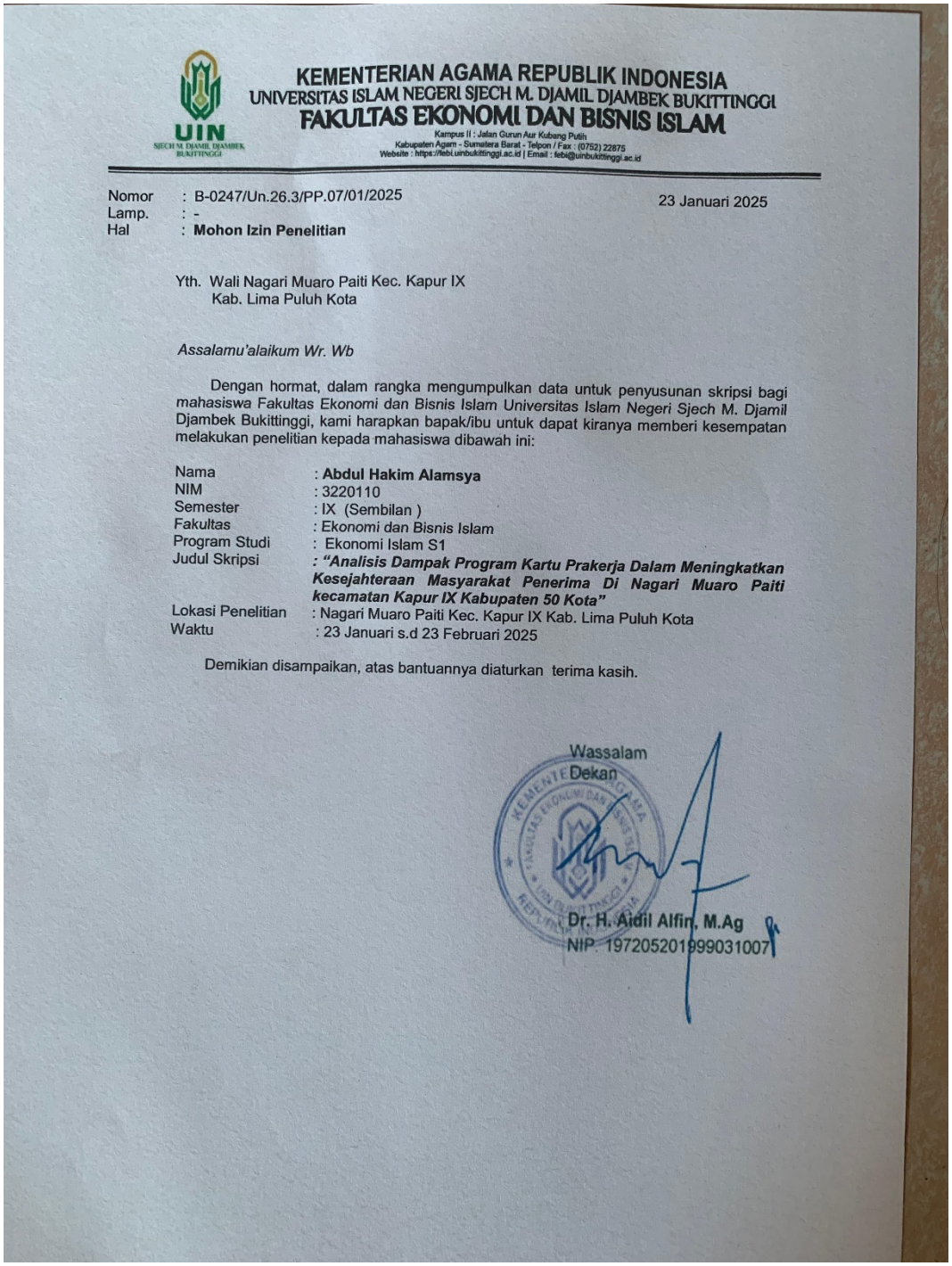
Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 22 Oktober 2024

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran II Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam – Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0247/Un.26.3/PP.07/01/2025 — 23 Januari 2025
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Wali Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX
Kab. Lima Puluh Kota

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

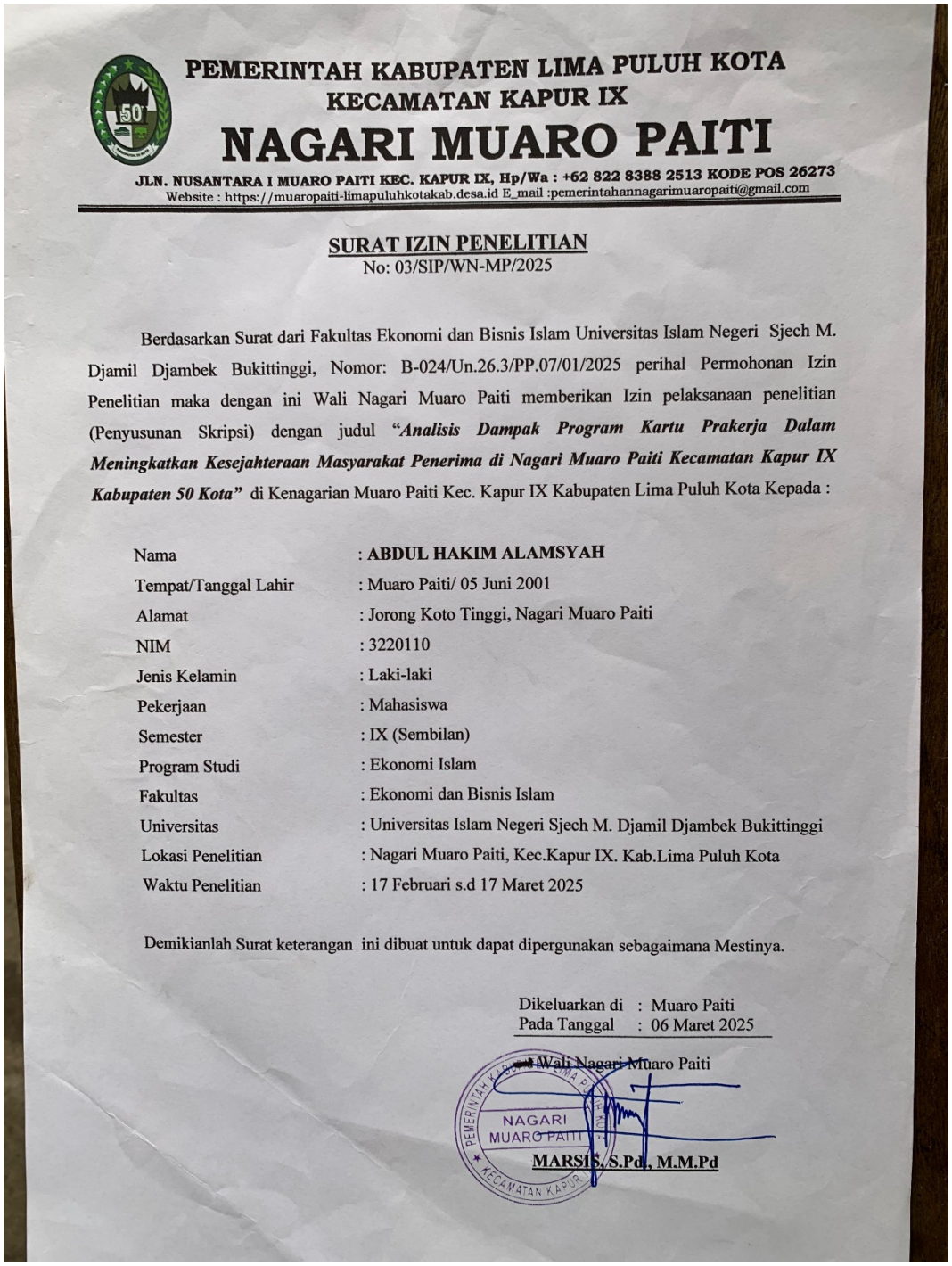
Nama	: **Abdul Hakim Alamsya**
NIM	: 3220110
Semester	: IX (Sembilan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Dampak Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Di Nagari Muaro Paiti kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota"***
Lokasi Penelitian	: Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota
Waktu	: 23 Januari s.d 23 Februari 2025

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran III Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN KAPUR IX
NAGARI MUARO PAITI

JLN. NUSANTARA I MUARO PAITI KEC. KAPUR IX, Hp/Wa : +62 822 8388 2513 KODE POS 26273
Website : https://muaropaiti-limapuluhkotakab.desa.id E_mail :pemerintahannagarimuaropaiti@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN
No: 03/SIP/WN-MP/2025

Berdasarkan Surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Nomor: B-024/Un.26.3/PP.07/01/2025 perihal Permohonan Izin Penelitian maka dengan ini Wali Nagari Muaro Paiti memberikan Izin pelaksanaan penelitian (Penyusunan Skripsi) dengan judul "***Analisis Dampak Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota***" di Kenagarian Muaro Paiti Kec. Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Kepada :

Nama	: **ABDUL HAKIM ALAMSYAH**
Tempat/Tanggal Lahir	: Muaro Paiti/ 05 Juni 2001
Alamat	: Jorong Koto Tinggi, Nagari Muaro Paiti
NIM	: 3220110
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Semester	: IX (Sembilan)
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Lokasi Penelitian	: Nagari Muaro Paiti, Kec.Kapur IX. Kab.Lima Puluh Kota
Waktu Penelitian	: 17 Februari s.d 17 Maret 2025

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.

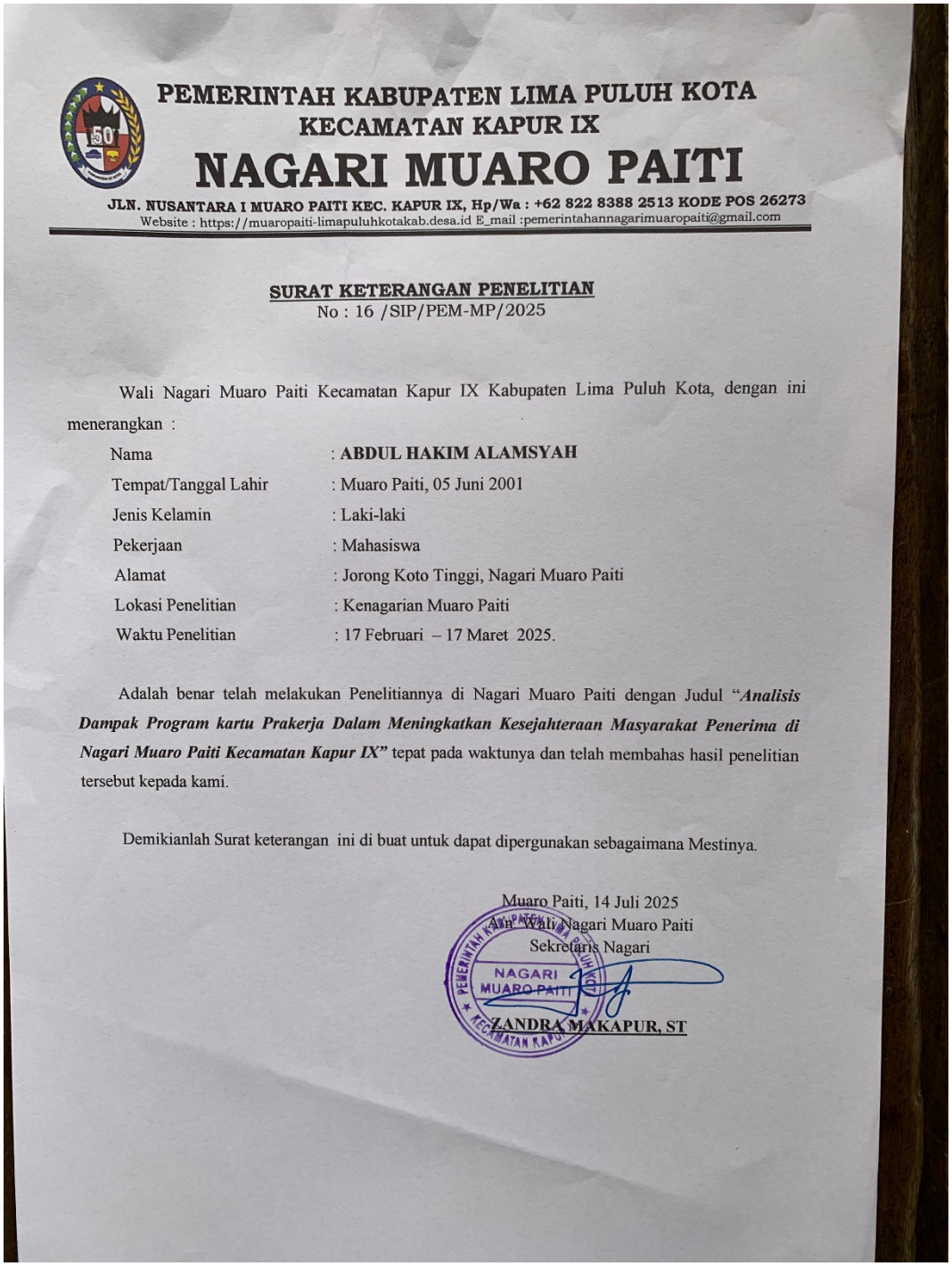
Dikeluarkan di : Muaro Paiti
Pada Tanggal : 06 Maret 2025

Wali Nagari Muaro Paiti

NAGARI MUARO PAITI

MARSIS, S.Pd., M.M.Pd

Lampiran IVSurat Pernyataan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN KAPUR IX
NAGARI MUARO PAITI
JLN. NUSANTARA I MUARO PAITI KEC. KAPUR IX, Hp/Wa : +62 822 8388 2513 KODE POS 26273
Website : https://muaropaiti-limapuluhkotakab.desa.id E_mail :pemerintahannagarimuaropaiti@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No : 16 /SIP/PEM-MP/2025

Wali Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ini menerangkan :

Nama	: **ABDUL HAKIM ALAMSYAH**
Tempat/Tanggal Lahir	: Muaro Paiti, 05 Juni 2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Koto Tinggi, Nagari Muaro Paiti
Lokasi Penelitian	: Kenagarian Muaro Paiti
Waktu Penelitian	: 17 Februari – 17 Maret 2025.

Adalah benar telah melakukan Penelitiannya di Nagari Muaro Paiti dengan Judul "***Analisis Dampak Program kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX"*** tepat pada waktunya dan telah membahas hasil penelitian tersebut kepada kami.

Demikianlah Surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Muaro Paiti, 14 Juli 2025
An. Wali Nagari Muaro Paiti
Sekretaris Nagari

NAGARI MUARO PAITI

ZANDRA MAKAPUR, ST

Lampiran V Pedoman Wawancara

Nama	: Abdul Hakim Alamsya
Nim	: 3220110
Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Analisis Dampak Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur Ix Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Apakah Bapak/Ibuk sudah mempunyai device yang sudah ada jaringan internetnya?
2. Apakah Bapak/Ibuk ada kendala dalam mengunakan teknologi untuk mendaftar program prakerja?
3. Apakah Bapak/Ibuk ada masalah jaringan untuk mengakses program prakerja melalui online?
4. Apakah ini disebabkan oleh jaringan atau banyaknya orang yang mengakses website program prakerja tersebut?
5. Apakah Bapak/Ibuk sebelumnya tahu tentang orang mengunakan pihak ketiga dalam mendaftarkan diri dalam penerimaan program prakerja?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibuk tentang orang mengunakan pihak ketiga untuk mengharapkan insetifnya saja?
7. Apakah di sekitaran lingkunagn Bapak/Ibuk ini yang kebutuhan sudah tercukupi masih mendaftarkan dirinya dalam penerimaan program prakerja?
8. Apakah sebelumnya Bapak/Ibuk sudah mendapatkan program kartu prakerja?
9. Apakah ada pelatihan yang di buat pemerintah untuk orang penerimaan program prakerja?

10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibuk dengan adanya pelatihan dari pemerintah ini bisa membantu Bapak/Ibuk untuk kedepannya?
11. Apakah Bapak/ibuk mengunakan uang program prakerja tersebut untuk memenuhi kebutuhan saja atau ada membuka usaha?
12. Apakah dengan adanya program prakerja ini kebutuhan Bapak/Ibuk sudah tercukupi atau belum?
13. Bagaimana pendapat Bapak/Ibuk dengan nominal uang yang didapatkan sudah bisa dikatakan sejahtera orang yang mendapatkannya?
14. Apakah Bapak/Ibuk ada saran tentang program prakerja ini untuk kedepannya agar permasalahan ini tidak terulang lagi?

Lampiran VI Dokumentasi












SAN FRANCISCO
Giants